

Sistem Akuntansi Bank Indonesia

Abdul Rauf dan Haris Effendi



BANK INDONESIA

Seri Kebanksentralan ini diterbitkan oleh:
Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK)
BANK INDONESIA
Jl. MH. Thamrin No. 2, Gd. A lt. 18, Jakarta 10010
No. Telepon: 021-3817628, No. Fax: 021-3501912
e-mail: PPSK@bi.go.id

Penulis adalah peneliti pada Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan – Bank Indonesia
Isi dalam tulisan ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis

Sistem Akuntansi Bank Indonesia

Abdul Rauf dan Haris Effendi

PUSAT PENDIDIKAN DAN STUDI KEBANKSENTRALAN (PPSK)
BANK INDONESIA

Jakarta, Juni 2005

Abdul Rauf dan Haris Effendi

Sistem Akuntansi Bank Indonesia/Abdul Rauf
dan Haris Effendi-- Jakarta :
Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan
(PPSK) BI, 2005.

i-viii; 61 hlm.; 15,5 cm x 23 cm. – (Seri
Kebanksentralan; 16)

Bibliografi: hlm. – 59

ISBN 979-96630-2-4

Sambutan

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan ini Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), Bank Indonesia kembali menerbitkan buku seri kebanksentralan. Penerbitan buku ini sejalan dengan amanat yang diemban dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk mewujudkan transparansi kepada masyarakat luas. Selain itu, sebagai sumbangsih dalam kegiatan wawasan dan pembelajaran kepada masyarakat, Bank Indonesia juga terus berupaya meningkatkan kualitas publikasi yang ditujukan untuk memperkaya khazanah ilmu kebanksentralan.

Buku seri kebanksentralan merupakan rangkaian tulisan mengenai ilmu kebanksentralan ditinjau dari aspek teori maupun praktek, yang ditulis oleh para penulis dari kalangan Bank Indonesia sendiri. Buku seri ini dimaksudkan untuk memperkaya khazanah kepustakaan mengenai berbagai aspek kebanksentralan terutama yang dilakukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Sebagai bacaan masyarakat umum, buku seri ini ditulis dalam bahasa yang cukup sederhana dan mudah dipahami, serta sejauh mungkin menghindari penggunaan istilah-istilah teknis yang kiranya dapat mempersulit pembaca dalam memahami isi buku.

Penulisan buku seri kebanksentralan ini diorganisir secara sistematis dengan terlebih dahulu menerbitkan buku seri mengenai aspek-aspek pokok kebanksentralan, yaitu: (1) bidang moneter, (2) bidang perbankan, (3) bidang sistem pembayaran, dan (4) bidang organisasi dan manajemen bank sentral. Selanjutnya masing-masing bidang dirinci dengan topik-topik khusus yang lebih fokus pada tema tertentu yang tercakup pada salah satu bidang tugas bank sentral. Dengan demikian sistematika publikasi buku seri kebanksentralan ini analog dengan pohon yang terdiri dari batang yang memiliki cabang dan ranting-ranting. Sebagai kelanjutan buku seri sebelumnya, pada kesempatan ini diterbitkan buku seri yang terkait dengan bidang manajemen intern dengan topik Sistem Akuntansi Bank Indonesia. Buku ini membahas

teori dan konsep umum Sistem Akuntansi dan pelaksanaan sistem akuntansi di Bank Indonesia, yang dimulai dari Kebijakan Sistematika dan aplikasi kesimpulan dalam peroses akuntansi di Bank Indonesia.

Akhirnya, pada kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada para penulis yang telah berusaha secara maksimal serta pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi berharga dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat dan menambah khazanah pengetahuan kita.

Jakarta, Juni 2005

Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan

Tarmiden Sitorus

Direktur

Pengantar

Setiap pengambilan keputusan ekonomi tentu memerlukan informasi keuangan yang akurat agar keputusan yang diambil tepat dan berhasil guna. Sistem Akuntansi sebagai sistem yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan menjadi sangat penting untuk menjamin apakah informasi keuangan yang dihasilkan cukup akurat atau tidak. Oleh karena itu, sistem akuntansi yang baik dan andal mutlak diperlukan.

Bank Indonesia sebagai institusi publik yang harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat, yang salah satu wujudnya adalah dengan menyampaikan laporan keuangan publikasi, harus mampu memperlihatkan kepada masyarakat bahwa laporan keuangan yang dipublikasikan tersebut merupakan laporan keuangan yang wajar dan disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku umum. Oleh karena itu, maka perlu diinformasikan kepada masyarakat bahwa sistem akuntansi yang diterapkan di Bank Indonesia merupakan sistem yang andal dan dapat dipercaya.

Buku ini merupakan sarana untuk memasyarakatkan sistem akuntansi Bank Indonesia, sebagai bagian dari upaya Bank Indonesia untuk lebih meningkatkan transparansi pelaksanaan tugas kepada publik. Juga dimaksudkan sekaligus mengisi "ruang kosong" betapa sulitnya memperoleh referensi mengenai praktek akuntansi keuangan di Bank Indonesia (BI).

Terbitnya buku seri kebanksentralan tentang sistem akuntansi BI ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembacanya khususnya bagi pihak eksternal Bank Indonesia (masyarakat) dalam rangka memahami sistem akuntansi yang diterapkan di BI, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pengenalan masyarakat terhadap Bank Indonesia selaku bank sentral Republik Indonesia.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta dan membantu memperkaya materi serta memberikan saran dalam penulisan buku ini, khususnya rekan-rekan di Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Direktorat Keuangan Intern dan direktorat-direktorat lain yang ikut berperan demi kelancaran penyusunan buku seri kebanksentralan ini.

Akhir kata, tiada gading yang tak retak. penulis sangat menyadari bahwa buku ini masih mengandung beberapa kekurangan. Sebagai manusia biasa, yang secara harfiah memiliki keterbatasan dan tidak luput dari kealpaan, maka penulis sangat terbuka terhadap koreksi, kritik dan masukan demi kesempurnaan buku ini. Tak lupa kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, dimana karena atas kuasaNya jua, di tengah-tengah kesibukan melaksanakan tugas sehari-hari selaku karyawan Bank Indonesia, penulis masih dapat menyelesaikan buku Seri Kebanksentralan Sistem Akuntansi Bank Indonesia ini.

Jakarta, Juni 2005

Penulis

Daftar Isi

Sambutan	i
Pengantar	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
Pengertian Sistem Akuntansi	1
Gambaran Umum Sistem Akuntansi Bank Indonesia	3
Sistematika Penulisan	4
BAB II SISTEM AKUNTANSI DAN PENERAPANNYA DI BANK SENTRAL	6
Pengertian Sistem Akuntansi	6
Aspek-aspek Sistem Akuntansi	7
Sistem Akuntansi di Bank Sentral	10
BAB III SISTEM AKUNTANSI BANK INDONESIA	17
Perkembangan Sistem Akuntansi di Bank Indonesia	18
Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (PAKBI)	21
Sistematika Akun (Rekening)	27
Aplikasi Sistem Akuntansi Bank Indonesia	30
Laporan Keuangan Bank Indonesia	38
Peranan Sistem Akuntansi bagi Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia	39
Arah Kebijakan Sistem Akuntansi Bank Indonesia	41
BAB IV PENUTUP	42
Daftar Pustaka	44
Lampiran	45

Pendahuluan

Pengertian Sistem Akuntansi

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada dasarnya akuntansi tidaklah dapat dipisahkan dengan masalah informasi, khususnya informasi keuangan. Tujuan utama akuntansi adalah bagaimana menyajikan informasi keuangan yang bersifat kuantitatif secara tepat waktu, akurat, lengkap, andal, dan terpercaya, sehingga berhasil guna untuk pengambilan keputusan bagi para pemakainya, baik bagi pihak internal organisasi, yaitu manajemen, maupun bagi pihak eksternal, seperti pemegang saham, calon investor, kreditor, dan juga pemerintah. Agar akuntansi dapat menghasilkan informasi keuangan atau yang lebih kita kenal dengan nama laporan keuangan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu didukung oleh suatu sistem akuntansi yang baik dan andal.

Sistem yang dalam pengertian umum disamakan dengan "cara" atau "mekanisme" adalah *perangkat unsur yang secara teratur saling berkait sehingga membentuk suatu totalitas/kesatuan*¹. Kalau kita jabarkan lebih lanjut, maka sistem dapat diartikan sebagai seperangkat unsur yang secara teratur saling berkait sehingga membentuk suatu mekanisme yang sistematis dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, sistem akuntansi dapat diartikan sebagai seperangkat unsur yang secara teratur saling berkait sehingga membentuk satu mekanisme untuk mencapai tujuan

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (2001), "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Balai Pustaka, Jakarta.

SISTEM AKUNTANSI BANK INDONESIA

akuntansi, yaitu menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat, lengkap, andal dan, terpercaya.

Laporan keuangan akan memberikan manfaat yang optimal bagi pengguna kalau laporan tersebut dapat menyajikan informasi yang benar dan dapat menggambarkan secara obyektif sifat dan kondisi organisasi atau usaha yang dilaporkan sesuai dengan yang dibutuhkan pengguna. Oleh karena itu, laporan keuangan suatu jenis industri tertentu tidak akan sama dengan industri yang lainnya, khususnya dilihat dari penekanan informasi yang disajikannya, misalnya, laporan keuangan untuk jenis usaha perdagangan tidak akan sama dengan laporan keuangan untuk usaha manufaktur, dan tentu saja akan berbeda pula untuk laporan keuangan jenis usaha jasa, seperti perbankan.

Demikian pula halnya dengan sistem akuntansi sebagai sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan. Kalau laporan keuangan untuk masing-masing jenis usaha berbeda khususnya dari sisi informasi yang diungkapkan, maka sistem akuntansi yang diterapkan untuk masing-masing jenis usaha juga akan berbeda sesuai dengan sifat dan karakteristik dari jenis usaha yang bersangkutan. Sistem akuntansi untuk usaha manufaktur akan berbeda dengan sistem akuntansi untuk perbankan, sistem akuntansi untuk perbankan juga akan berbeda dengan sistem akuntansi untuk Bank Sentral karena karakteristik dan tugas-tugas Bank Sentral pada dasarnya berbeda dengan usaha perbankan.

Gambaran Umum Sistem Akuntansi Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- (i) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;

- (ii) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
- (iii) Mengatur dan mengawasi bank.

Sehubungan dengan tugas tersebut, semua kegiatan Bank Indonesia dilakukan tidak atas dasar pertimbangan komersial, tetapi lebih diarahkan pada pengendalian jumlah uang beredar dan pemeliharaan sistem perbankan nasional. Namun demikian, sebagai lembaga negara yang strategis dan independen, Bank Indonesia wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya, antara lain melalui penyampaian informasi berupa laporan keuangan yang dapat dipercaya, tepat waktu, dan akurat kepada publik.

Sesuai dengan tujuan dan tugasnya selaku Bank Sentral sebagaimana tersebut di atas, maka sistem akuntansi yang diterapkan di Bank Indonesia adalah suatu sistem akuntansi yang diutamakan untuk dapat menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengendalian jumlah uang beredar, kelancaran sistem pembayaran, dan pemeliharaan sistem perbankan yang sehat.

Penerapan sistem akuntansi di Bank Indonesia diatur dalam suatu ketentuan berupa Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia, yaitu PDG No. 1/12/PDG/1999 tentang Sistem Akunting Bank Indonesia. Sedangkan Kebijakan Akuntansi yang dianut Bank Indonesia diatur dalam Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (PAKBI). PAKBI tersebut disusun dengan mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), *International Accounting Standard (IAS)*, Peraturan Intern Bank Indonesia, dan praktek-praktek yang lazim dilakukan oleh Bank Sentral negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan antara Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia. Agar senantiasa sejalan dengan perkembangan SAK-IAI, dan IAS, PAKBI selalu disempurnakan, terakhir dengan Surat Edaran Nomor 5/47/INTERN tanggal 31 Oktober 2003 tentang Perubahan ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia 4/58/INTERN tanggal 31 Desember 2002 tentang PAKBI.

SISTEM AKUNTANSI BANK INDONESIA

Memang harus diakui, adalah sulit untuk dapat mengetahui dan mempelajari praktek akuntansi keuangan di Bank Indonesia (BI). Hal ini bukan terletak pada materi, tetapi lebih kepada ketersediaan informasi. Buku-buku akuntansi yang dijual di toko buku rasanya sangat jarang bahkan mungkin tidak ada yang membahas mengenai akuntansi keuangan Bank Sentral, khususnya akuntansi BI. Tidak hanya itu, materi pelajaran akuntansi yang diajarkan di universitas-universitas juga belum ada yang secara khusus mengenalkan akuntansi BI.

Disadari bahwa masih sangat sedikit atau terbatas anggota masyarakat yang mengetahui tentang BI dibandingkan dengan yang mengetahui tentang Bank Rakyat Indonesia (BRI) atau Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 1946). Kenyataan tersebut dapat dipahami mengingat fungsi dan tugas BI selaku Bank Sentral memang tidak langsung berhubungan dengan masyarakat luas sebagaimana yang dilakukan oleh bank-bank komersial tersebut di atas. Kondisi ini berjalan sampai dengan kurun waktu tahun 1999. Mengapa sampai dengan tahun 1999 ? Itu adalah tahun ketika terjadi perubahan yang mendasar atas keberadaan BI, tepatnya tanggal 17 Mei 1999, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Perubahan mendasar itu tidak hanya mengenai penegasan atas tugas pokok dan independensi BI, tetapi juga menyangkut keterbukaan atau transparansi BI. Yang dimaksudkan dengan keterbukaan di sini adalah kewajiban BI untuk mempublikasikan laporan keuangannya. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung budaya keterbukaan dan transparansi BI tersebut, maka dianggap perlu untuk menginformasikan kepada masyarakat luas tentang sistem akuntansi yang diterapkan di BI yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan BI yang dipublikasikan.

Sistematika Penulisan

Di dalam Bab 1 yang merupakan pendahuluan diuraikan mengenai apa itu sistem akuntansi serta kenapa sistem akuntansi diperlukan. Dalam bab ini juga diungkapkan mengenai gambaran secara umum

sistem akuntansi yang berlaku di Bank Indonesia, serta harapan dari penulis mengapa buku seri kebanksentralan sistem akuntansi Bank Indonesia ini diterbitkan.

Dalam bab 2 secara umum diuraikan aspek-aspek teoretis yang terkait dengan pengertian sistem akuntansi berikut unsur-unsurnya. Disamping itu, digambarkan pula mengenai sistem akuntansi yang berlaku di beberapa Bank Sentral di dunia.

Bab 3 merupakan penjelasan yang lebih rinci dari sistem akuntansi Bank Indonesia yang secara singkat telah digambarkan dalam Bab 1. Di dalam bab ini dijelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi Bank Indonesia berikut alasan mengapa kebijakan tersebut diterapkan, perbedaan dengan kebijakan-kebijakan akuntansi yang secara umum diterapkan di bank-bank komersial, serta uraian tentang proses penyusunan kebijakan akuntansi di Bank Indonesia. Selain itu, akan diuraikan juga sistematika akun dan aplikasi-aplikasi sistem komputer yang digunakan dalam proses akuntansi di Bank Indonesia, serta manfaat output yang dihasilkan oleh sistem akuntansi, yaitu berupa laporan keuangan bagi pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia (contoh laporan keuangan Bank Indonesia berikut penjelasannya dapat dibaca pada lampiran). Dalam bab ini juga secara singkat diuraikan bagaimana dan seperti apa arah kebijakan sistem akuntansi Bank Indonesia ke depan.

Bab 4 merupakan penutup dari buku seri kebanksentralan sistem akuntansi Bank Indonesia.

SISTEM AKUNTANSI DAN PENERAPANNYA DI BANK SENTRAL

Pengertian Sistem Akuntansi

Akuntansi adalah bahasa bisnis. Setiap badan usaha akan menggunakan akuntansi sebagai alat komunikasi dan masyarakat memandangnya sebagai suatu aturan bisnis yang harus dilaksanakan sebagai alat untuk pertanggungjawaban. *Accounting Principles Board* dalam *Statement No. 4* memberikan pengertian akuntansi sebagai, *"Suatu jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan, tentang satuan ekonomi, guna pengambilan keputusan ekonomi yaitu dalam penetapan pilihan yang tepat di antara beberapa alternatif tindakan"*² (terjemahan penulis).

Suatu informasi keuangan akan bermanfaat apabila informasi tersebut tepat waktu, akurat, relevan, dan lengkap. Untuk dapat menghasilkan informasi sebagaimana tersebut di atas, fungsi akunting harus didukung oleh suatu Sistem Akuntansi yang memadai berupa seperangkat aturan-aturan, standar, kebijakan, pencatatan, prosedur, dan hubungan- hubungan yang bersifat organisatoris yang ditata untuk mengendalikan aktivitas sumber daya dalam rangka menyediakan informasi bagi keperluan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengambilan keputusan oleh pihak yang memerlukan, serta sebagai alat pengendalian intern guna mengamankan harta kekayaan dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas.

Perangkat aturan, standar, kebijakan, prosedur, dan hubungan-hubungan yang bersifat organisatoris tersebut adalah merupakan aspek-aspek dari sistem akuntansi.

² Financial Accounting Standard Board, Financial Accounting Standards.

Aspek-aspek Sistem Akuntansi

Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Salah satu pihak yang menggunakan laporan keuangan sebagai alat bantu pengambilan keputusan adalah pihak-pihak di luar perusahaan atau pihak eksternal, seperti investor, kreditor, pemerintah, calon investor, calon kreditor, dan lain sebagainya. Agar laporan keuangan tidak menyesatkan dan menimbulkan kesalahpahaman pihak eksternal dalam membaca dan menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut, maka diperlukan suatu standar yang sama, yang dapat dijadikan sebagai acuan baik bagi penyusun maupun pembaca laporan keuangan. Standar tersebut dinamakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan pedoman yang harus diacu dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan bagi para pemakai di luar manajemen perusahaan³. SAK harus dijadikan sebagai acuan dalam pengukuran, pencatatan, penggolongan, dan pelaporan transaksi keuangan suatu perusahaan.

Sistematika Rekening atau Sistematika Akun

Transaksi keuangan suatu perusahaan, khususnya untuk perusahaan yang relatif besar, pada umumnya cukup banyak jumlahnya atau cukup tinggi frekuensinya. Oleh karena itu, agar pencatatan transaksi menjadi efisien dan mudah, maka disediakan tempat untuk mencatatnya. Tempat untuk mencatat transaksi tersebut dinamakan rekening atau akun. Rekening atau akun memiliki beberapa variasi bentuk standar, antara lain:

³ Ikatan Akuntan Indonesia (1999), Standar Akuntansi Keuangan.

Rekening Bentuk Saldo Berjalan

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO

Rekening Bentuk Saldo Debet - Kredit

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO	
				DEBET	KREDIT

Rekening Bentuk Skontro

TGL	KETERANGAN	JUMLAH	TGL	KETERANGAN	JUMLAH

Setiap rekening harus diberi nama yang jelas sehingga mudah diketahui hal-hal apa yang harus dicatat dalam masing-masing rekening tersebut, apakah berkaitan dengan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, maupun biaya.

Jumlah rekening yang harus digunakan dalam suatu perusahaan tergantung pada berbagai faktor, antara lain sifat dan volume operasi perusahaan, serta seberapa jauh keterincian informasi yang diinginkan. Semakin rinci informasi yang dibutuhkan berarti semakin banyak pula rekening yang harus disediakan. Guna mempermudah penyajian informasi atau penyusunan laporan keuangan, khususnya bagi perusahaan yang memiliki rekening relatif banyak, maka sebaiknya rekening tersebut diberi sandi berupa angka atau abjad

Sistem Akuntansi dan Penerapannya di Bank Sentral

atau kombinasi dari keduanya. Pemberian sandi hendaknya dilakukan secara sistematis dan berdasarkan suatu hirarki tertentu, dengan susunan untuk rekening yang merupakan ikhtisar atau buku besar (*general ledger*) diusahakan merupakan pos-pos dalam laporan keuangan. Susunan nama-nama dan sandi rekening yang berdasarkan hirarki tertentu dan sistematis disebut bagan rekening atau *chart of account* atau sistematika rekening. Contoh dari suatu sistematika rekening adalah sebagai berikut:

1 Aktiva	2 Kewajiban
11 Aktiva Lancar	21 Kewajiban Lancar
111 Kas	211 Utang Dagang
112 Bank, dst.....	212 Utang Bank, dst.....
12 Aktiva Tidak Lancar	3 Modal
121 Tanah	31 Modal Saham
122 Bangunan, dst.....	32 Laba Ditahan, dst.....

Prosedur atau Proses.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 791 didefinisikan "*Prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktifitas*" dan "*Proses adalah rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk*". Dalam akuntansi, prosedur juga menggambarkan tingkatan atau hirarki kewenangan dan otorisasi dalam masing-masing tahapan proses akuntansi baik melalui struktur organisasi maupun dalam bentuk *job manual*. Tujuan diterapkannya suatu prosedur antara lain adalah untuk:

- menjamin keakuratan dan kelengkapan pencatatan transaksi;
- menjamin ketepatan penerapan standar dan kebijakan akuntansi; dan
- menghindari terjadinya kecurangan

SISTEM AKUNTANSI BANK INDONESIA

Sebagai penghasil laporan keuangan yang merupakan alat bantu pengambilan keputusan pihak internal dan eksternal perusahaan, sistem akuntansi yang baik juga harus mampu membantu manajemen dalam melaksanakan pekerjaan manajerial. Pekerjaan seorang manajer dapat dipisahkan menjadi empat fungsi utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengendalian. Oleh karena itu, sistem akuntansi harus mengandung/memiliki prosedur atau proses yang andal yang dapat menjamin ketersediaan informasi keuangan yang tepat waktu, akurat, lengkap, dan terpercaya serta mampu menjadi alat bantu bagi manajemen dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengendalian.

Dalam masa-masa yang lalu, prosedur atau proses akuntansi dilakukan secara manual tanpa alat bantu teknologi. Namun, dengan adanya perubahan lingkungan yang menghendaki adanya efisiensi, keakuratan, dan kecepatan dalam penyajian informasi keuangan, maka peranan teknologi informasi atau komputer menjadi sangat penting. Oleh karena itu, dalam era globalisasi ini hampir semua sistem akuntansi di perusahaan terutama perusahaan yang relatif besar telah memanfaatkan teknologi komputer di dalam proses akuntansi.

Untuk dapat lebih memahami apa itu sistem akuntansi, di bawah ini akan diberikan contoh penerapan sistem akuntansi di dalam praktek. Sesuai dengan tujuan buku ini, maka contoh yang dipilih adalah contoh penerapan sistem akuntansi di Bank Sentral.

Sistem Akuntansi di Bank Sentral

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab 1 bahwa sistem akuntansi Bank Sentral tidak sama dengan sistem akuntansi bank komersial, meskipun memiliki kemiripan. Hal ini dikarenakan tujuan dan tugas Bank Sentral bukanlah diutamakan untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana tujuan bank komersial, melainkan lebih untuk melaksanakan pengendalian moneter.

Uraian mengenai sistem akuntansi Bank Sentral ini berdasarkan referensi dari buku-buku yang diterbitkan oleh *International*

Sistem Akuntansi dan Penerapannya di Bank Sentral

Monetary Fund (IMF) yang merupakan rangkuman dari praktek-praktek akuntansi di Bank Sentral-Bank Sentral, yang diperoleh melalui *work shop* antar Bank Sentral di seluruh dunia yang diselenggarakan secara tahunan oleh IMF, serta dari hasil studi komparasi penulis baik melalui bacaan maupun kunjungan di beberapa Bank Sentral.

Kebijakan Akuntansi Bank Sentral

John Dalton dan Chris Ford⁴, dalam naskahnya "*General Purpose Financial Statements for Central Banks*" mengatakan bahwa 35 standar dari International Accounting Standard (IAS) mempunyai potensi untuk dapat diterapkan di organisasi perbankan termasuk Bank Sentral, tetapi yang paling relevan untuk bank adalah IAS 1 (*Presentation of Financial Statements*), IAS 30 (*Disclosure in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions*), IAS 32 (*Financial Instruments: Disclosure and Presentation*), dan IAS 39 (*Financial Instruments: Recognition and Measurement*). Dalam kaitannya dengan Bank Sentral, mereka antara lain mengatakan bahwa "Ketaatan terhadap standar akuntansi dan pengungkapan yang berlaku, seperti IAS, merupakan prasyarat penerapan Transparansi dan *Good Governance*" (terjemahan penulis). Oleh karena itu, sedapat mungkin dalam menetapkan kebijakan akuntansinya Bank Sentral hendaknya tetap mengacu kepada IAS.

Oleh karena tugas dan fungsi Bank Sentral sebagaimana disebutkan di atas, maka terdapat beberapa kekhususan perlakuan akuntansi di Bank Sentral dibandingkan dengan bank komersial. Kekhususan-kekhususan tersebut antara lain penyajian kas di dalam neraca, pengakuan hasil revaluasi aktiva dan kewajiban dalam valuta asing, perlakuan akuntansi emas, dan *Special Drawing Rights* (SDR).

Sebagian besar Bank Sentral di dunia mempunyai tugas sebagai bank sirkulasi, yaitu lembaga yang berwenang untuk menerbitkan

⁴ John Dalton dan Chris Ford adalah konsultan IMF yang diperbantukan di Bank Indonesia dalam rangka penyempurnaan Pedoman Akuntansi Bank Indonesia (PAKBI).

SISTEM AKUNTANSI BANK INDONESIA

dan mengedarkan uang kartal (*bank notes*). Karena fungsi tersebut, maka uang kartal yang berada di tangan masyarakat merupakan kewajiban Bank Sentral kepada masyarakat. Untuk mengetahui jumlah kewajiban Bank Sentral dalam bidang pengedaran uang atau berapa jumlah uang yang beredar di masyarakat, dilakukan dengan cara mengurangi seluruh jumlah uang yang telah dicetak dengan uang kas yang ada di khasanah Bank Sentral. Oleh karena itu, pada umumnya Bank Sentral menyajikan kas dalam neraca di sisi kewajiban sebagai pengurang (*off-set account*) dari jumlah uang yang dicetak dan tidak sebagai komponen aktiva lancar sebagaimana yang dilakukan oleh bank-bank komersial. Metode penyajian seperti ini kita kenal dengan istilah metode neto walaupun tidak menutup kemungkinan ada Bank Sentral yang menganut metode *gross* dalam menyajikan kas.

Pada umumnya Bank Sentral memiliki posisi aktiva bersih dalam valuta asing (net open position) dalam jumlah yang relatif besar. Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan kecukupan cadangan devisa negara yang bersangkutan. Dalam kaitan ini, tujuan utama Bank Sentral bukanlah untuk mencari keuntungan sebagaimana motif bank komersial, melainkan dalam rangka mempertahankan stabilitas harga.

Mengacu kepada IAS 21 dan juga PSAK 10, aktiva dan kewajiban dalam valuta asing harus direvaluasi sejalan dengan naik turunnya kurs valuta asing terhadap mata uang negara yang bersangkutan. Hasil revaluasi ini diakui sebagai keuntungan atau kerugian periode berjalan dan dilaporkan dalam laporan laba rugi.

Mengingat fungsi dan tujuan kepemilikan valuta asing oleh Bank Sentral sebagaimana tersebut di atas, Bank Sentral tidak langsung mengakui hasil revaluasi aktiva dan kewajiban dalam valuta asing sebagai keuntungan atau kerugian, tetapi mencatatnya sebagai *unrealized income* dan disajikan di neraca dalam kelompok ekuitas. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari IMF⁵ agar Bank Sentral (terjemahan penulis):

5 International Monetary Fund (1977), "Accounting for Foreign Exchange in Central Bank Operations"

Sistem Akuntansi dan Penerapannya di Bank Sentral

- mencatat realisasi keuntungan dan kerugian dari transaksi valas dalam Laporan Laba Rugi (*income statement*); dan
- menanggukuhkan pengakuan keuntungan dan kerugian dari transaksi valas yang belum direalisasi (*unrealized forex gains/ losses*) dan menyajikannya dalam Rekening Cadangan Revaluasi di dalam neraca;
- rekening Cadangan Revaluasi harus dipelihara (ditatausahakan) per masing-masing jenis valas;
- untuk keperluan penilaian persediaan valas guna menetapkan Harga Pokok Penjualan valas (*the cost of the currency sold*), LIFO, LIFO *average*, atau *weighted average* adalah metode-metode yang paling tepat untuk Bank Sentral.

Pertimbangan pencatatan hasil revaluasi aktiva dan kewajiban dalam valuta asing di neraca dan bukannya di laporan laba rugi adalah:

- untuk menjamin bahwa perubahan kurs valuta asing tidak berdampak inflatoir terhadap pendapatan Bank Sentral;
- untuk menghindari distribusi keuntungan yang bersumber dari *unrealized gains* kepada Pemerintah.

Dengan kata lain, monetisasi dari *unrealized gains* dapat berpengaruh negatif terhadap kebijakan moneter. Di samping itu, distribusi *unrealized gains* kepada pemerintah dapat menurunkan *solvency* Bank Sentral dan dapat menghambat kemampuan operasional Bank Sentral dalam melaksanakan tugasnya.

Emas merupakan salah satu aset utama bagi Bank Sentral dan termasuk komponen cadangan devisa, di samping di masa-masa yang lalu emas juga dipakai sebagai jaminan dalam tugas pengedaran uang. Oleh karena itu, dalam neraca Bank Sentral emas lazimnya disajikan pada urutan pertama dalam neraca Bank Sentral. Perlakuan akuntansi untuk emas di bank-Bank Sentral negara Eropa (ECB) adalah sebagai berikut⁶:

⁶ European Central Bank, "Decision Of The European Central Bank On The Annual Accounts Of The European Central Bank As Amended On 15 December 1999".

SISTEM AKUNTANSI BANK INDONESIA

- Emas direvaluasi dan disajikan dengan menggunakan harga pasar (*mid-market rates and prices*);
- Tidak ada pemisahan antara hasil revaluasi emas akibat perubahan kurs dan harga emas, tetapi revaluasi dihitung persatuan harga emas dalam euro berdasarkan perubahan kurs EUR terhadap USD.

Special Drawing Rights (SDR) adalah dana cadangan internasional yang diciptakan oleh IMF dan dialokasikan untuk negara anggotanya. Nilai SDR dalam ekuivalen USD ditetapkan secara harian berdasarkan sekelompok (basket) dari lima mata uang, yaitu USD, DEM, Franc Perancis, Yen Jepang, dan Pound Sterling. Translasi nilai SDR ke dalam mata uang domestik dilakukan melalui USD. Alokasi SDR, rekening-rekening yang terkait dengan SDR (misal: *interest accrued*), dan posisi cadangan devisa di IMF dipelihara dalam denominasi SDR. Rekening-rekening tersebut harus dinilai berdasarkan kurs yang ditetapkan secara harian oleh IMF. Revaluasi dapat dilakukan secara harian, mingguan, atau bulanan.

Sistematika Rekening (*Chart of Account*) untuk Bank Sentral.

Sistematika rekening atau *chart of account* merupakan satu dari pilar (*basic building block*) suatu sistem akuntansi. Oleh karena itu, susunan atau sistematika rekening harus mampu merefleksikan kegiatan utama suatu organisasi. Aktifitas utama Bank Sentral adalah mengelola kondisi moneter dalam perekonomian. Sebagai konsekuensinya, Bank Sentral memiliki beberapa aset dan kewajiban yang bersifat "*unique*" serta beberapa rekening khusus yang diperlukan berkaitan dengan aktifitas tersebut. Oleh karena itu, *chart of account* untuk Bank Sentral harus dibedakan dari bank komersial⁷).

IMF merekomendasikan bahwa *chart of account* untuk Bank Sentral hendaknya didesain secara khusus untuk merefleksikan

7 International Monetary Fund (1996), "Central Bank Accounting Workshop Collection, Vol. 3 - Chart of Account".

Sistem Akuntansi dan Penerapannya di Bank Sentral

aktivitas Bank Sentral sebagai pengendali moneter. Klasifikasi struktur rekening untuk Bank Sentral dapat disusun sebagai berikut: secara hirarki menggunakan tiga digit kode *numeric* sebagai identifikasi rekening individual. Digit pertama merepresentasikan kelas dari asset, kewajiban, modal & cadangan, pendapatan atau biaya. Digit kedua menggambarkan group rekening dari masing-masing kelas, dan digit ketiga menunjukkan individual rekening dalam tiap-tiap grup. Contoh sistematika rekening untuk Bank Sentral adalah sebagai berikut:

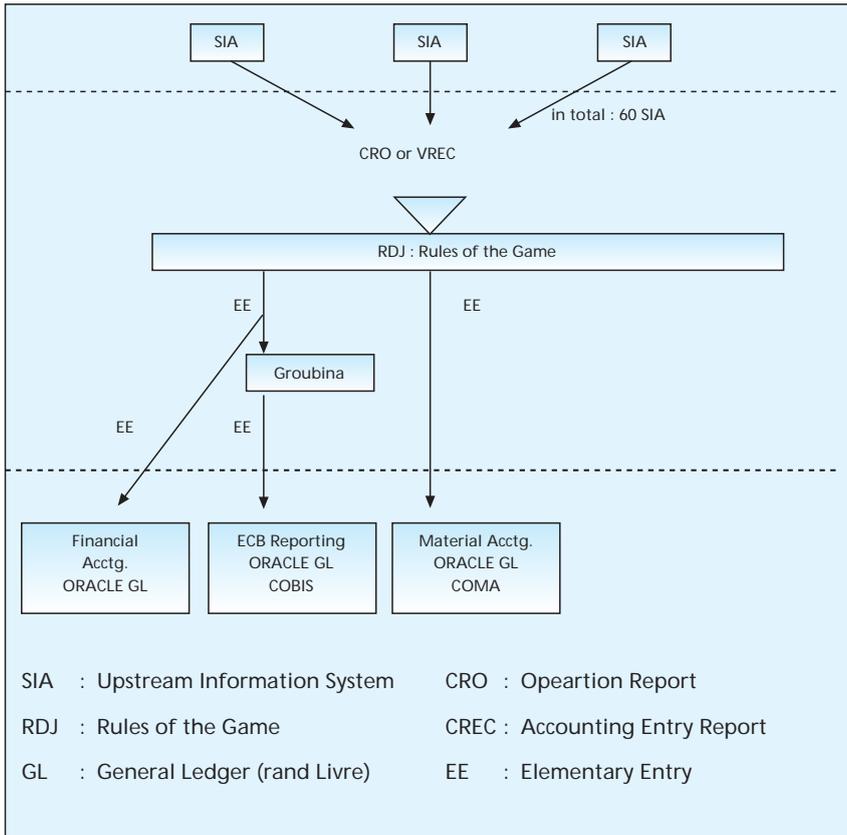
1 <i>Asset</i>	3 <i>Liabilities</i>
11 <i>Domestic Cash</i>	31 <i>Currency Issued</i>
12 <i>Gold and Precious Metals</i>	32 <i>Central Bank Bills in Circulation</i>
13 <i>Foreign Currency,</i>	33 <i>Foreign Currency Liabilities,</i>
2 <i>Other Assets</i>	4 <i>Capital and Reserve</i>
21 <i>Fixed Assets,</i>	41 <i>Paid-In Capital</i>
	42 <i>Reserves</i>

Ilustrasi di bawah adalah gambaran sistem akuntansi yang diterapkan di *Banque De France* Perancis untuk menghasilkan laporan keuangan (contoh laporan keuangan beberapa Bank Sentral dapat dibaca pada lampiran).

SISTEM AKUNTANSI BANK INDONESIA

ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM - AIS FUNCTIONS AND ORGANISATION

A. Application architecture



(Sumber : Banque de Franc Seminar Handout)

SISTEM AKUNTANSI BANK INDONESIA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, Bank Indonesia memerlukan berbagai macam informasi baik berupa informasi keuangan maupun nonkeuangan untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan. Informasi keuangan disajikan dalam suatu laporan, yaitu laporan keuangan sebagai hasil akhir dari proses akuntansi.

Sebagaimana telah diungkapkan dalam bab-bab terdahulu bahwa suatu informasi keuangan akan bermanfaat apabila informasi tersebut tepat waktu, akurat, relevan, dan lengkap. Untuk dapat menghasilkan informasi sebagaimana tersebut di atas, fungsi akunting harus didukung oleh suatu sistem akuntansi yang memadai. Sistem akuntansi di Bank Indonesia diatur dalam suatu ketentuan berupa Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia No.1/12/PDG/1999 tentang Sistem Akunting Bank Indonesia. Berdasarkan PDG dimaksud, sistem akuntansi Bank Indonesia meliputi prinsip-prinsip, kebijakan, hubungan organisasional, prosedur, dan hubungan antarprosedur yang dirancang untuk mencatat transaksi keuangan, mengendalikan kegiatan operasional dan sumber daya Bank Indonesia, serta menyajikan informasi keuangan dalam rangka perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaporan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka aspek-aspek sistem akuntansi di Bank Indonesia meliputi: Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (PAKBI), Buku Pedoman Sistematika Rekening (BPSR), petunjuk teknis otomasi sistem akunting yang terdiri Bank Indonesia Aplikasi Sistem Akunting (BIASA), Bank Indonesia Aplikasi Nostro Gabungan (BIANG), Bank Indonesia Sistem Anggaran (BISA) dan Bank Indonesia Data Akuntansi

SISTEM AKUNTANSI BANK INDONESIA

dan Keuangan (BIDAK), dan telah disempurnakan dan diintegrasikan menjadi Sentralisasi Otomasi Sistem Akunting (SOSA).

Sebelum membahas lebih lanjut secara rinci aspek-aspek sistem akuntansi di Bank Indonesia, terlebih dahulu dijelaskan perkembangan sistem akuntansi di Bank Indonesia sejak era Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

Perkembangan Sistem Akuntansi Bank Indonesia

Sebelum Era Komputerisasi.

Sebelum tahun 1980, era ketika keberadaan BI diatur dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, sistem akuntansi Bank Indonesia yang pada masa itu lebih dikenal dengan istilah sistem pembukuan dan penyusunan neraca Bank Indonesia memiliki kondisi sebagai berikut:

- Neraca Gabungan Bank Indonesia disusun dengan menggabungkan neraca dari unit-unit pembukuan di kantor pusat dan kantor cabang yang mungkin mengandung angka-angka dari tanggal neraca yang berbeda sehingga berpotensi memberikan gambaran yang bias;
- Penyusunan neraca gabungan yang meliputi pengelompokan, penggabungan, pemindahbukuan, dan sebagainya ada sebagian yang dikerjakan di dalam catatan, dan hasilnya dipindahkan ke dalam formulir neraca gabungan;
- Neraca belum sepenuhnya menunjukkan informasi yang cermat sehubungan dengan tugas Bank Indonesia selaku Bank Sentral karena beberapa pengelompokan rekening-rekening yang disadari kemudian kurang tepat.

Memasuki periode tahun 1980, Bank Indonesia menyusun buku pedoman yang disebut Buku Pedoman Sistematika Neraca (BPSN) yang berisi kebijakan-kebijakan akuntansi, sistematika rekening, dan prosedur-prosedur akuntansi di Bank Indonesia. Dalam era ini,

beberapa perubahan telah dilakukan, yaitu antara lain penyempurnaan sistematika rekening dan proses penyusunan neraca gabungan. Rekening dikelompokkan kembali sesuai sifat dan fungsinya dan telah digunakan sistematika yang lebih terstruktur dengan memperkenalkan istilah rekening “grup” (rekening buku besar), rekening “subgrup”, dan rekening “individual”. Pengelompokan grup dan subgrup rekening didasarkan pada tugas-tugas pokok Bank Indonesia. Neraca Gabungan Bank Indonesia disusun oleh kantor pusat (Bagian Administrasi Pusat) berdasarkan rekening-rekening buku besar (grup) yang ditatausahakannya. Era BPSN ini merupakan era persiapan untuk komputerisasi sistem akunting di Bank Indonesia.

Era Komputerisasi Sistem Akunting

Dengan semakin beratnya beban tugas yang harus diemban oleh Bank Indonesia, seperti terjadinya perkembangan yang begitu pesat di sektor industri perbankan, maka ada tuntutan untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Hal ini diperlukan agar pengambilan keputusan dan kebijakan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Bank Indonesia mulai mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis komputer. Era komputerisasi sistem akunting Bank Indonesia dimulai pada tahun 1989, yaitu sejak diimplementasikan Bank Indonesia Aplikasi Sistem Akunting atau BIASA. Proses akuntansi dengan memanfaatkan teknologi komputer tersebut dinamakan Otomasi Sistem Akunting (OSA). Sejak saat itu, penyempurnaan-penyempurnaan sistem akuntansi di Bank Indonesia terus dilakukan, di antaranya dengan diterbitkannya Prinsip Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (PAKBI) pada tahun 1995 dan Buku Pedoman Sistematika Rekening (BPSR) pada tahun 1996.

Pada awalnya OSA di Bank Indonesia terdiri dari beberapa sistem yang belum terintegrasi, yaitu:

- Bank Indonesia Aplikasi Sistem Akunting (BIASA/OSA), yaitu sistem

SISTEM AKUNTANSI BANK INDONESIA

yang digunakan untuk mencatat dan memproses transaksi-transaksi keuangan dalam mata uang Rupiah, kecuali transaksi penerimaan dan pengeluaran. BIASA adalah sistem aplikasi yang digunakan di kantor pusat, sedangkan OSA digunakan di Kantor Bank Indonesia (kantor cabang).

- Bank Indonesia Aplikasi Nostro Gabungan (BIANG), yaitu sistem yang digunakan untuk mencatat dan memproses transaksi-transaksi keuangan dalam mata uang asing. BIANG hanya digunakan di kantor pusat Bank Indonesia.
- Bank Indonesia Sistematika Anggaran (BISA), yaitu sistem yang digunakan untuk menyusun anggaran (rencana keuangan), dan mencatat serta memproses transaksi-transaksi penerimaan dan pengeluaran. BISA digunakan di seluruh kantor Bank Indonesia baik pusat maupun cabang.
- Bank Indonesia Data Akuntansi dan Keuangan (BIDAK) yang merupakan sistem untuk mengkonsolidasi data akuntansi (transaksi) dari seluruh sistem aplikasi akunting yang ada. BIDAK juga merupakan sistem yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi Bank Indonesia.
- Sistem Informasi dan Monitoring Antar Kantor (SIMAK), yaitu sistem yang digunakan untuk memonitor transaksi-transaksi antar kantor.

Penyempurnaan sistem akuntansi di Bank Indonesia masih terus dilakukan, lebih-lebih lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yang menuntut Bank Indonesia untuk lebih transparan dan *accountable* di dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh sistem-sistem yang ada menjadi satu sistem yang disebut Sentralisasi Otomasi Sistem Akunting Bank Indonesia(SOSA).

Di samping itu, Bank Indonesia juga memiliki beberapa sistem

aplikasi lain guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokoknya, yaitu:

- *Real Time Gross Settlement (RTGS)*, yang digunakan untuk mencatat transaksi/transfer dana antarbank, dalam rangka mendukung kelancaran sistem pembayaran.
- *On-line Processing Integrated Computer System (OPICS)* yaitu sistem tresuri yang berfungsi sebagai sistem *front office* untuk mencatat dan memproses transaksi devisa Bank Indonesia melalui *Dealing Room* guna mendukung tugas Bank Indonesia dalam mengelola devisa negara.

Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (PAKBI)

Pencatatan transaksi keuangan BI mengacu pada Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (PAKBI), suatu pedoman yang merupakan himpunan prinsip dan teknis akuntansi yang mengatur metode pencatatan, penilaian, pengakuan, pelaporan, dan pengungkapan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi di Bank Indonesia, yang terdiri dari standar akuntansi Aktiva, standar akuntansi Kewajiban, standar akuntansi Modal, standar akuntansi Pendapatan, dan standar akuntansi Biaya.

PAKBI pada awalnya merupakan kependekan dari Prinsip Akuntansi Keuangan Bank Indonesia yang disusun dan dimaksudkan untuk digunakan sendiri oleh BI. Pada tahun 1995 pernah dilakukan peninjauan dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengenai kemungkinan PAKBI ini dijadikan sebagai salah satu standar akuntansi keuangan dan menjadi bagian dari Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dengan sebutan Standar Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (SAKBI). Namun, berdasarkan penjelasan dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), kata standar digunakan untuk suatu acuan yang dipakai oleh lebih dari satu entitas. Dengan demikian, PAKBI yang hanya digunakan oleh BI tidak tepat apabila dijadikan sebagai suatu standar akuntansi

SISTEM AKUNTANSI BANK INDONESIA

keuangan. DSAK mengusulkan untuk memakai kata pedoman sehingga namanya menjadi Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (PAKBI).

Alasan mengapa BI menyusun PAKBI

Sebagaimana diketahui bahwa IAI sebagai organisasi profesi yang diberi kewenangan menetapkan standar akuntansi keuangan di Indonesia telah menyusun Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk dijadikan acuan dalam penyusunan laporan keuangan khususnya untuk pelaporan kepada para pemakai di luar manajemen perusahaan. Namun, sebagaimana telah dikemukakan pada bab 1 bahwa sebagai Bank Sentral BI memiliki tugas dan fungsi yang jauh berbeda dengan bank komersial apalagi dengan perusahaan pada umumnya. Tugas dimaksud adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter guna mencapai tujuan utama, yaitu kestabilan nilai Rupiah.

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan kegiatan-kegiatan pokok, antara lain sebagai berikut:

- Mengendalikan perkembangan uang giral dan uang kuasi.
Kegiatan tersebut dilakukan melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT) baik di pasar uang rupiah maupun di pasar valuta asing dengan tujuan untuk mempengaruhi likuiditas perekonomian melalui penarikan dana yang ada di perbankan yang merupakan faktor penting dalam penciptaan uang beredar.
- Menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap uang asing dengan mengelola cadangan devisa secara efektif dan efisien.

Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing tidak bisa lepas dari jumlah cadangan devisa yang dimiliki. Apabila cadangan devisa yang dimiliki cukup untuk memenuhi permintaan akan valuta asing (antara lain untuk kebutuhan impor), maka tidak akan

terjadi “gap” antara permintaan dan penawaran valuta asing, sehingga kurs rupiah terhadap valuta asing menjadi stabil. Untuk menjaga agar jumlah cadangan devisa yang dimiliki tetap mencukupi, maka dalam pengelolaannya Bank Indonesia lebih mengutamakan prinsip keamanan (*security*) dan likuiditas (*liquidity*) dibandingkan dengan prinsip keuntungan (*profitability*); keuntungan bukan merupakan tujuan utama dalam penanaman cadangan devisa, meskipun tidak boleh terabaikan.

- Mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah.

Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah. Ini berarti, uang yang beredar di masyarakat merupakan kewajiban BI kepada masyarakat karena pemegang uang kartal sama saja artinya dengan memiliki klaim kepada BI.

Mengingat karakteristik tugas dan kegiatan pokok BI tersebut, maka terdapat praktek-praktek akuntansi keuangan Bank Indonesia yang berbeda dengan bank umum, antara lain:

- Emas dan Uang Asing pada Neraca Bank Indonesia disajikan dalam pos tersendiri karena kedudukan Bank Indonesia sebagai pengelola devisa negara, disamping jumlahnya yang juga cukup material.
- Kas atau Uang kertas dan uang logam rupiah yang berada dalam kasanah, pada Neraca Bank Indonesia tidak disajikan sebagai salah satu komponen aktiva, tetapi sebagai faktor pengurang pos Uang Dalam Peredaran karena kedudukan Bank Indonesia sebagai Otoritas Moneter.
- Selisih kurs yang timbul karena penilaian kembali aktiva dan kewajiban dalam valuta asing belum diakui sebagai penerimaan atau pengeluaran sampai dengan terjadi realisasi transaksi atas aktiva dan kewajiban tersebut. Hal ini disebabkan karena tujuan utama kepemilikan aktiva dan kewajiban dalam valuta asing bukan untuk mencari keuntungan. Disamping itu, penerimaan

SISTEM AKUNTANSI BANK INDONESIA

atau pengeluaran selisih kurs yang belum direalisasikan tersebut dari waktu ke waktu dapat berbalik (*reversible*). Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*konservatisme*). Selisih kurs ini ditampung dalam rekening Cadangan Selisih Kurs dan disajikan dalam kelompok ekuitas.

- Dalam neraca BI terdapat pos *Special Drawing Rights* (SDR) sebagai cerminan tugas Bank Sentral yang mewakili Pemerintah dalam hubungan internasional, khususnya sebagai negara anggota IMF.

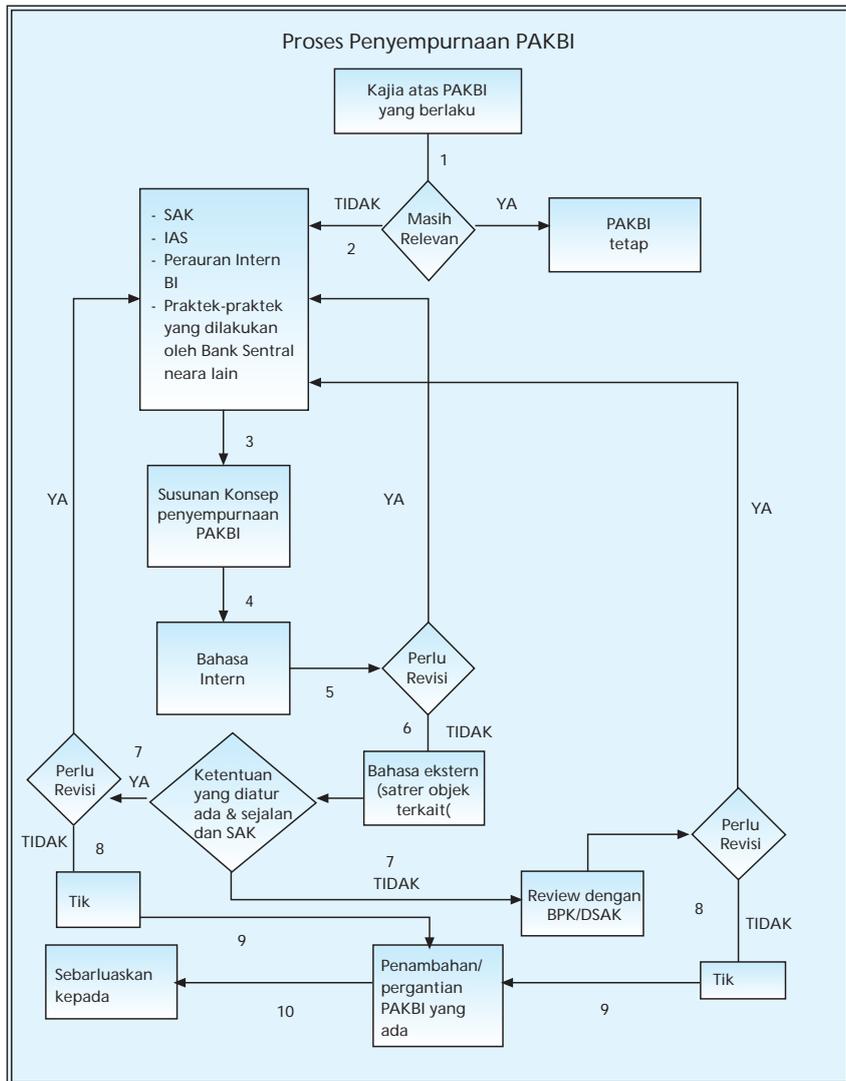
Beberapa praktek akuntansi khusus tersebut di atas, mengacu kepada praktek-praktek akuntansi yang lazim dilakukan oleh bank-Bank Sentral di seluruh dunia, dan sebagian di antaranya, standar akuntansi keuangan baik IAS maupun SAK belum/tidak mengatur hal-hal tersebut. Oleh karena itu, Bank Indonesia merasa perlu untuk menyusun PAKBI yang merupakan gabungan antara standar akuntansi keuangan yang berlaku umum (SAK) dan praktek-praktek akuntansi yang lazim dilakukan oleh Bank Sentral agar dapat:

- Menjadi pedoman umum dalam mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi Bank Indonesia.
- Menjaga konsistensi penerapan yang berkaitan dengan praktek akuntansi di Bank Indonesia dari waktu ke waktu.
- Memenuhi kebutuhan informasi keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengendalian moneter, pengaturan dan pengawasan bank, pelaksanaan sistem pembayaran, serta manajemen, khususnya pengelolaan keuangan Bank Indonesia.
- Menciptakan kesamaan pandang antara manajemen Bank Indonesia dan pemeriksa ekstern mengenai praktek akuntansi Bank Indonesia dan akhirnya menjadi acuan bagi pemeriksa ekstern di dalam menilai praktek akuntansi di Bank Indonesia.
- Merupakan dokumentasi yang terkait dengan praktek akuntansi di Bank Indonesia.

Sistem Akuntansi Bank Indonesia

Karena pada dasarnya PAKBI merupakan gabungan antara standar akuntansi keuangan yang berlaku umum (SAK) dan praktek-praktek akuntansi yang lazim dilakukan oleh Bank Sentral, maka cakupan isi PAKBI adalah untuk transaksi keuangan yang lazim dilakukan oleh perusahaan pada umumnya mengacu kepada SAK dan IAS, sedangkan untuk transaksi yang hanya lazim dilakukan oleh Bank Sentral mengacu kepada praktek akuntansi di Bank Sentral. Proses penyusunan dan penyempurnaan PAKBI adalah sebagaimana skema di bawah ini.

SISTEM AKUNTANSI BANK INDONESIA



Dalam perjalanannya, di pertengahan tahun 1997 atas inisiatif sendiri BI meminta bantuan (*technical assistance*) dari *International Monetary Fund* (IMF) untuk melihat dan mengkaji sistem akuntansi atau pencatatan keuangan BI apakah telah sejalan dengan praktek-

praktek yang berlaku umum. Dari hasil kajian tersebut, IMF merekomendasikan agar BI melakukan penyesuaian atas pencatatan transaksi keuangannya antara lain: 1) menerapkan dasar akrual (*accrual basis*), 2) menilai surat berharga dalam valuta asing berdasarkan harga pasar (*market value*), 3) mencatat *unrealised income* selisih kurs dalam rekening cadangan (dikenal dengan Dana Egalisasi) dan melaporkan *realised income* selisih kurs dalam laporan laba rugi), serta 4) menggunakan auditor international untuk mengaudit laporan keuangan BI dalam rangka meningkatkan kredibilitas BI. Disamping itu, pada tahun 2000 BI juga pernah mengadakan seminar dengan mengundang Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan para praktisi di bidang akuntansi untuk menyatukan pandang mengenai status PAKBI dan kaitannya dengan SAK. Dalam kesempatan itu disepakati bahwa PAKBI bisa dijadikan sebagai acuan bagi praktek akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Bank Indonesia.

Sistematika Akun (Rekening) Bank Indonesia

Sistem rekening Bank Indonesia merupakan struktur dan klasifikasi rekening-rekening yang berlaku di Bank Indonesia berdasarkan sifat dan fungsinya. Hal ini dimaksudkan agar setiap rekening dapat secara jelas mencerminkan hak dan kewajiban Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan fungsinya, baik sebagai Otoritas Moneter (Bank Sentral) maupun sebagai suatu badan usaha. Saat ini sistem rekening Bank Indonesia diatur dalam Buku Pedoman Sistematika Rekening (BPSR). Buku ini merupakan penyempurnaan dari Buku Pedoman Sistematika Neraca (BPSN) dan berfungsi untuk memberikan penjelasan secara singkat dan jelas tentang struktur, nama, dan sandi rekening yang digunakan di Bank Indonesia sehingga diperoleh pengertian dan pemahaman yang seragam; memberikan penjelasan secara singkat dan jelas tentang transaksi yang dicatat dalam masing masing rekening; memberikan penjelasan secara singkat dan jelas mengenai batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja-satuan kerja

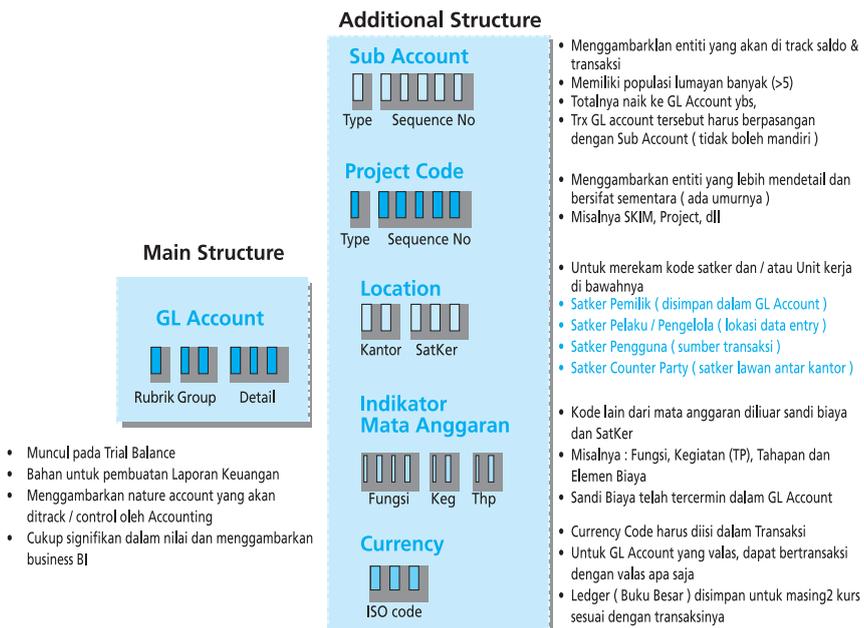
SISTEM AKUNTANSI BANK INDONESIA

di Bank Indonesia maupun pihak lain dalam kaitannya dengan pembukaan, penutupan, dan pengawasan rekening.

Prinsip-prinsip Sistematika Akun (Rekening) Bank Indonesia

Klasifikasi rekening diatur dengan memperhatikan sifat likuiditas aktiva sehingga aktiva yang lebih likuid diletakkan pada urutan yang lebih atas, sifat dan kegiatan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral sehingga rekening sehubungan dengan pengedaran uang diletakkan pada urutan paling atas diikuti dengan rekening kewajiban lainnya menurut jangka waktu pelunasan. Rekening-rekening penerimaan dan pengeluaran serta rekening-rekening administratif, komitmen, dan kontinjensi masing-masing dikelompokkan tersendiri.

Struktur akun pada awalnya terdiri dari sembilan digit dengan pengelompokan satu digit pertama disebut Rubrik, dua digit pertama disebut Grup, tiga digit pertama disebut Subgrup dan keseluruhan sembilan digit rekening disebut rekening Individual. Struktur akun tersebut kemudian disempurnakan sehingga menjadi sebagai berikut:



- Muncul pada Trial Balance
- Bahan untuk pembuatan Laporan Keuangan
- Menggambarkan nature account yang akan ditrack / control oleh Accounting
- Cukup signifikan dalam nilai dan menggambarkan business BI

Pembagian nomor akun untuk Rubrik adalah sebagai berikut:

- 1 Aktiva
- 2 Kewajiban
- 3 Ekuitas
- 4 Penerimaan
- 5 Pengeluaran
- 6 Rekening antara
- 7 Komitmen dan Kontinjen

Pemberian nomor akun untuk Grup adalah sesuai dengan nomor urut pos-pos di neraca, sebagai contoh:

- 01 Emas
- 02 Uang Asing
- 03 *Special Drawing Rights*
- 13 Tagihan Kepada Bank Umum

Detail merupakan rincian dari pos-pos di neraca, sebagai contoh:

- 326 *Tagihan kepada Bank KLBI-KMK*
- 327 *Tagihan kepada Bank KLBI-KKPA*
- 328 *Tagihan kepada Bank KLBI-PIR*

Perubahan struktur akun menjadi seperti tersebut di atas dilakukan dengan pertimbangan agar:

- Mempermudah penyusunan laporan;
- Struktur tidak rentan terhadap perubahan Sandi Akun;
- Fasilitas *lookup* lebih fleksibel dan dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan *user (filter & sort)*;

SISTEM AKUNTANSI BANK INDONESIA

- Terintegrasi dengan mata anggaran hingga ke *level* Elemen Biaya (EB);
- Memungkinkan untuk analisis dengan *Drill Down* menurut struktur yang dipilih (*top-down, re-grouping, filtering, sort, subtotal, dll*)

Fungsi dan Tujuan Pengaturan Sistematis Rekening

Sistem rekening berfungsi sebagai alat bantu bagi manajemen dalam menatausahakan data-data transaksi keuangan guna menghasilkan informasi-informasi yang menyangkut bidang keuangan.

Tujuan pengaturan sistem rekening adalah untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan Bank Indonesia dan laporan-laporan lain yang dihasilkan dari sistem akuntansi sehingga dapat memberikan informasi yang cepat, jelas, akurat, dan lengkap.

Aplikasi Sistem Akuntansi Bank Indonesia

Sebagaimana telah diuraikan di depan bahwa mulai tahun 1989 Bank Indonesia secara bertahap telah memanfaatkan teknologi informasi atau teknologi komputer di dalam memproses transaksi keuangannya, mulai dari pencatatan sampai kepada penyajian dalam bentuk laporan keuangan. Karena adanya tuntutan tugas yang semakin berat yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yang menuntut Bank Indonesia untuk lebih transparan dan *accountable* kepada publik, maka Bank Indonesia telah menggulirkan program transformasi dalam berbagai bidang, di antaranya dalam *planning, budgeting, dan performance measurement* (P, B & PM).

Sebagai konsekuensi dari transformasi tersebut diperlukan pula transformasi/penyempurnaan di dalam sistem yang terkait, yaitu

sistem *accounting* dan *budgeting*, atau dalam pengertian luasnya adalah sistem keuangan. Hal ini sejalan dengan *blue print* Manajemen Keuangan Bank Indonesia (MKBI), yang telah disusun pada tahun 2000 dengan bantuan konsultan PT. Ernst & Young, untuk menciptakan sistem keuangan Bank Indonesia yang lebih komprehensif, terotomasi, dan terintegrasi dalam upaya mewujudkan *good governance*.

Sistem keuangan Bank Indonesia yang telah disempurnakan yang meliputi sistem akunting dan anggaran dan dikenal dengan nama SOSA (Sentralisasi Otomasi Sistem Akunting) memiliki karakteristik sebagai berikut:

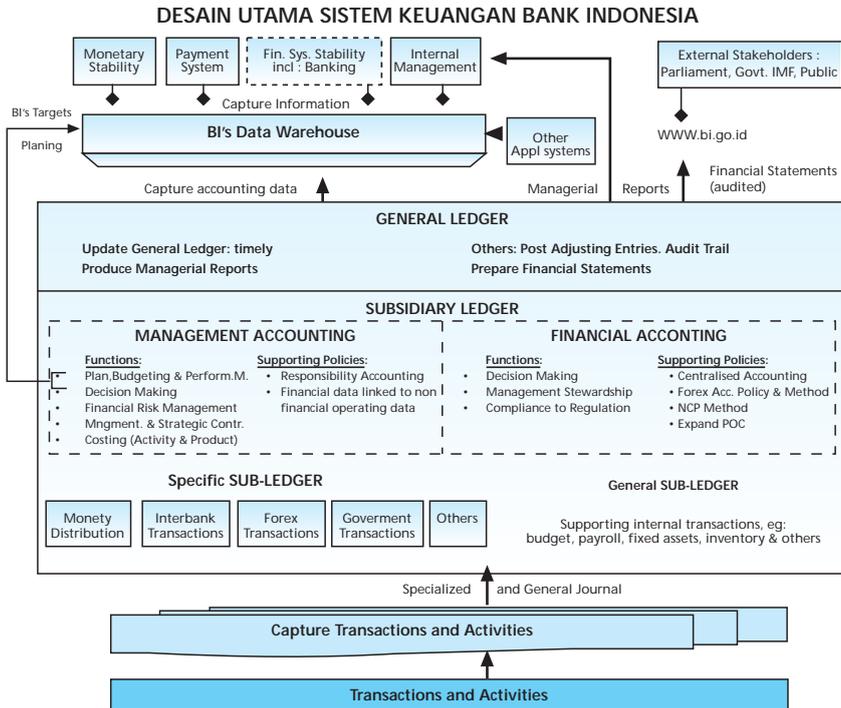
- Suatu sistem keuangan yang terintegrasi yang dapat menunjang fungsi *planning*, *actuating*, *reporting*, dan *monitoring* terhadap kegiatan keuangan intern Bank Indonesia.
- Suatu sistem yang dapat memproses transaksi keuangan untuk menghasilkan data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu, yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh sistem data *warehouse* Bank Indonesia untuk menunjang kebutuhan sistem informasi *core function* suatu Bank Sentral.
- Suatu sistem yang dapat menghasilkan informasi/laporan yang dapat digunakan untuk kebutuhan deteksi dini (*early warning*) dan analisis dalam rangka menunjang fungsi pengendalian keuangan (*management control*) dan manajemen resiko yang pada akhirnya menunjang proses pengambilan keputusan yang berbasis informasi (*information-based decision making*).
- Suatu sistem yang terintegrasi meliputi *General Ledger System* dan *Subsidiary Ledger*, yang menunjang kebutuhan fungsi *financial accounting* dan *management accounting*.
- Suatu sistem yang didasarkan pada proses dan prosedur akunting serta kaidah-kaidah kebijakan akuntansi yang diterima umum (*best practice*), dan praktek-praktek akuntansi di bank-Bank Sentral.

SISTEM AKUNTANSI BANK INDONESIA

- Suatu sistem yang dapat digunakan untuk memantau pertanggungjawaban setiap satuan kerja atas apa yang telah dilakukannya secara finansial, sebagaimana suatu entitas melaksanakan *responsibility accounting* pada umumnya.
- Suatu sistem yang dapat memudahkan penelusuran informasi dan data ke sumber dokumen aslinya (*audit trail*).
- Suatu sistem yang dapat berinteraksi (*interface*) dengan sistem-sistem aplikasi lainnya, khususnya yang bersifat finansial secara lancar, aman, dan terkendali.

Dari hasil kajian berbagai literatur yang diperoleh dari studi pustaka dan dokumen lain yang terkait dengan sistem keuangan yang di antaranya bersumberkan dari best practice di beberapa Bank Sentral sebagaimana telah disinggung dalam bab II, maka sistem keuangan Bank Indonesia harus dapat memenuhi fungsi financial accounting dan management accounting.

Dalam rangka mewujudkan sistem keuangan Bank Indonesia yang memenuhi kedua fungsi tersebut di atas, perlu disusun suatu desain utama (grand design) sistem keuangan Bank Indonesia yang akan menjadi acuan dalam pengembangan sistem keuangan di Bank Indonesia. Desain Utama sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini merupakan suatu diagram Hierarchical Input-Process-Output (HIPO).



Gambar 3. *Grand Design* Sistem Keuangan Bank Indonesia

Penjelasan gambar di atas adalah sebagai berikut:

Input.

Transaksi-transaksi yang dibukukan di SOSA dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- Transaksi-transaksi yang berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas pokok Bank Indonesia, antara lain:
 - **Money distribution.** Money Distribution merupakan salah satu aktivitas yang berkaitan dengan fungsi Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran, yang mencakup impor dan penyimpanan bahan uang kertas dan logam, order cetak uang dan penyimpanan hasil cetak uang, pendistribusian, Pemberian

SISTEM AKUNTANSI BANK INDONESIA

Tanda Tidak Berharga (PTTB), dan pemusnahan uang.

- **Interbank Transactions.** *Interbank Transactions merupakan salah satu transaksi yang berkaitan dengan fungsi Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran, yang meliputi transaksi antarbank, antara lain penyelenggaraan kegiatan kliring antarbank (Retail Value Payment Systems) serta RTGS (High Value Payment Systems). Dalam hal ini Bank Indonesia tidak hanya bertindak selaku peserta saja, namun juga sebagai pengatur, penyedia sistem dan prosedur, pelaksana settlement dan pengawasan (oversight).*
- **Forex Transactions.** *Forex Transactions merupakan salah satu transaksi yang berkaitan dengan fungsi Bank Indonesia di bidang pengelolaan devisa dengan melakukan kegiatan sebagaimana umumnya bank devisa, antara lain melakukan penempatan cadangan devisa dan trading valuta asing.*
- **Government Transactions.** *Government Transactions merupakan salah satu transaksi yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia selaku kasir Pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Pemerintah, misalnya, penerimaan pajak. Berkaitan dengan tugas ini Bank Indonesia juga melakukan fungsi penatausahaan rekening Pemerintah dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban Pemerintah Indonesia selaku anggota badan-badan keuangan dunia, seperti IMF, World Bank, ADB dan lainnya. Di samping itu Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakannya, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri.*
- *Transaksi-transaksi yang bersifat umum dan tidak terkait langsung dengan tugas pokok Bank Indonesia, seperti pembelian aktiva tetap, dll.*

Proses

Input berupa transaksi keuangan akan dicatat sesuai dengan jenis transaksi dan aktivitasnya, yaitu untuk transaksi-transaksi yang berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas pokok Bank Indonesia dan memiliki atau membutuhkan subledger khusus dalam penatausahaannya akan dicatat atau di-entry melalui Specific Subledger, sedangkan transaksi yang bersifat umum dicatat dalam general subledge,. Pengertian specific journal, bukan dalam artian bentuk jurnal atau kegiatan penjurnalan/pencatatan yang berbeda, tetapi lebih kepada jenis-jenis transaksinya yang berbeda, yaitu spesifik Bank Sentral.

Selanjutnya masing-masing subledger tersebut akan bermuara pada general ledger. Fungsi general ledger yang akan dicapai dalam sistem keuangan Bank Indonesia ini adalah General Ledger sebagaimana umumnya yang berlaku dalam bentuk yang lebih baku, condensed dan consolidated yang menggambarkan penyajian laporan keuangan secara menyeluruh dengan berpedoman kepada aturan-aturan yang diterima secara umum (generally accepted), baik dari segi materi maupun formatnya. Oleh karena itu, fungsi sistem General Ledger tersebut pada intinya adalah sebagai berikut:

- Dapat melakukan up-date data GL tepat waktu sehingga data tersebut selalu terkini dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan laporan serta analisis-analisis yang diperlukan.
- Sebagaimana umumnya suatu proses GL system, sistem ini akan menghasilkan berbagai laporan-laporan keuangan yang diperlukan bagi keperluan intern dan ekstern Bank Indonesia selaku stakeholders.
- Di samping itu, proses GL system tersebut juga dapat menghasilkan laporan-laporan manajerial walaupun terbatas menggunakan data yang berasal dari proses akunting dan anggaran serta data keuangan lainnya yang terkait (transfer dana antarbank/RTGS, gaji dan emolumen, pengedaran uang, dan sebagainya), sehingga secara terbatas dapat menghasilkan laporan-laporan untuk

SISTEM AKUNTANSI BANK INDONESIA

keperluan berbagai sektor, misalnya, moneter (jumlah uang yang beredar), perbankan (saldo rekening giro bank, perhitungan denda GWM), sistem pembayaran (transfer dana antarbank dan setelmennya), serta keperluan manajemen intern, dalam kaitannya untuk perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring/pengendalian keuangan, khususnya dalam rangka menunjang fungsi pengendalian dan manajemen resiko keuangan.

- *Memiliki fasilitas untuk memproses after balance sheet date events, khususnya untuk melakukan adjustments yang diperlukan dalam rangka mengkoreksi transaksi sebelumnya. DKI cq. Bagian Laporan Keuangan dapat melakukan adjustments dengan menggunakan fasilitas khusus yang terpisah dari fungsi pencatatan transaksi operasional (sisi front-end). Hal ini sebagai bagian dan upaya untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dengan dukungan sistem aplikasi yang andal dan memenuhi tuntutan business requirements.*
- *Memenuhi persyaratan audit trail sebagai bagian dari good governance. Proses ini memungkinkan pentrasiran transaksi hingga ke dokumen aslinya. Dengan demikian, proses ini ditunjang oleh sistem pencatatan yang menggunakan acuan dalam bentuk kode dan penomoran, sehingga memudahkan proses cross-checking.*

Output

Output yang diharapkan dari sistem keuangan Bank Indonesia adalah:

- *Tersedianya managerial report secara tepat waktu untuk mendukung fungsi management accounting dalam rangka planning, budgeting and performance measurement, decision making, financial risk management, management & strategic control, dan costing (activity and product). Untuk mendukung pelaksanaan fungsi management accounting khususnya*

performance measurement *perlu adanya* supporting policies *berupa penerapan* responsibility accounting.

- *Tersedianya financial statements secara tepat waktu untuk mendukung fungsi* financial accounting, *yaitu* decision making, management stewardship, dan compliance to regulation. *Untuk mendukung pelaksanaan fungsi* financial accounting *perlu adanya* supporting policies *berupa* centralized accounting, accounting policy and method, *dan expand* Point of Customer (POC).

Pencatatan transaksi keuangan melalui aplikasi sistem akuntansi sebagaimana tergambar di atas dilakukan dengan menerapkan suatu prosedur yang berisi langkah-langkah, teknik-teknik pencatatan, dan bagan alur dokumen dari penanganan suatu transaksi. Prosedur tersebut meliputi Validasi, Perekaman Data (data entry), Fiat Buku (Approval), dan Verifikasi.

Validasi adalah suatu proses pemeriksaan terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan warkat pembukuan yang antara lain meliputi : kebenaran penulisan nominal rupiah dalam angka dan huruf, masa berlakunya warkat, pemeteraian, tanda tangan dan cap perusahaan, nomor dan nama rekening, dll.

Perekaman Data (*data entry*) adalah proses merekam (*input*) data transaksi kedalam sistem komputer oleh petugas *data entry* yang antara lain meliputi : nomor urut pembukuan, tanggal transaksi, tanggal valuta, nomor dan nama rekening-rekening yang di debit dan di kredit, jumlah nominal, jenis mata uang, dll.

Fiat Buku (*approval*) adalah proses perekaman ulang data transaksi yang telah direkam oleh petugas *data entry*, sebagai alat kontrol untuk meyakinkan kebenaran hasil perekaman data oleh petugas *data entry*. Fiat buku dilakukan oleh pejabat yang pangkatnya lebih tinggi dari petugas *data entry*. Data yang direkam ulang hanya meliputi data-data yang penting antara lain nomor rekening yang di debit dan di kredit, serta jumlah nominal.

Verifikasi adalah proses pengecekan secara manual melalui *hard copy* hasil *print-out* komputer untuk meyakini kebenaran jurnal hasil

SISTEM AKUNTANSI BANK INDONESIA

perekaman data melalui sistem.

Prosedur-prosedur tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan akurasi dan keamanan penyelesaian suatu transaksi. Penyusunan prosedur akuntansi di Bank Indonesia dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan: satuan kerja yang bertanggung jawab atas suatu transaksi, batas-batas kewenangan penyelesaian transaksi, aliran/arus dokumen suatu transaksi, adanya pemisahan fungsi secara jelas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta personil yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Laporan Keuangan Bank Indonesia

Laporan Keuangan Bank Indonesia disusun mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/57/INTERN tanggal 31 Desember 2002 perihal Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/27/INTERN tanggal 28 Desember 1999 tentang Laporan Keuangan Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, laporan keuangan tahunan Bank Indonesia yang telah diaudit harus dipublikasikan di media massa.

Laporan Keuangan tahunan BI terdiri dari Neraca, Laporan Surplus Defisit, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Posisi Modal. Laporan Keuangan tersebut disusun atas dasar akrual dengan konsep nilai historis, kecuali untuk akun tertentu yang berdasarkan pengukuran sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi. Bentuk masing-masing jenis laporan keuangan Bank Indonesia berikut penjelasan kebijakan akuntansi yang mendasarinya dapat dibaca pada [lampiran](#).

Tentunya selain memahami sistem akuntansi dan pencatatan keuangan BI, tidak kalah pentingnya adalah menyadari bahwa keberadaan BI sebagai Bank Sentral dalam mengemban tugasnya memiliki beberapa kekhususan. Kekhususan tersebut antara lain : 1) memiliki hak tunggal (monopoli) mencetak dan mengedarkan uang

rupiah, 2) mengelola cadangan devisa negara, 3) hubungan keuangan dengan (kasir) Pemerintah. Juga harus difahami bahwa BI turut mempengaruhi perekonomian negara, misalnya, melalui pengelolaan dan penentuan jumlah uang primer (*base money*). Dalam kaitan ini akuntansi dan pencatatan keuangan BI tidak hanya berhenti di makna akuntansi semata, tetapi masih memiliki makna lanjutan terutama sumbangannya dalam mendukung perhitungan uang primer tersebut.

Dengan kedudukan yang spesifik dan strategis tersebut, laporan keuangan Bank Indonesia memiliki makna yang sangat penting dan khusus, yang selayaknya disadari oleh para penggunanya. Bagi pihak ekstern, baik domestik maupun internasional, laporan keuangan Bank Indonesia diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator tentang keadaan keuangan dan perekonomian negara Republik Indonesia. Sedangkan bagi Dewan Gubernur, laporan keuangan Bank Indonesia merupakan salah satu media pertanggungjawaban kinerja keuangan dan manajemen Bank Indonesia terhadap publik.

Peranan Sistem Akuntansi Bagi Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia

Sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- (i) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- (ii) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
- (iii) Mengatur dan mengawasi bank.

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan kegiatan-kegiatan pokok, antara lain sebagai berikut :

SISTEM AKUNTANSI BANK INDONESIA

- Mengendalikan perkembangan uang giral dan uang kuasi melalui Operasi pasar terbuka (OPT).

OPT adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi likuiditas perekonomian dengan cara melakukan penarikan (kontraksi) maupun ekspansi dana yang ada di perbankan yang merupakan faktor penting dalam penciptaan uang beredar. Agar kebijakan moneter yang dijalankan efektif sesuai dengan yang diharapkan, maka harus dilakukan secara cepat dan tepat. Untuk itu, diperlukan dukungan informasi mengenai jumlah uang beredar yang tepat waktu dan akurat. Informasi yang tepat waktu dan akurat tersebut dihasilkan oleh sistem akuntansi berupa Laporan *Worksheet* Uang Primer. Dengan demikian, efektif tidaknya kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia tidak bisa lepas dari dan tergantung pada memadai atau tidaknya sistem akuntansi yang dimiliki.

- Menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap uang asing dengan mengelola cadangan devisa secara efektif dan efisien.

Tinggi rendahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing tergantung pada ada atau tidak adanya "*gap*" antara permintaan dan penawaran valuta asing. Agar "*gap*" tidak terjadi, maka Bank Indonesia harus dapat menjaga kecukupan jumlah cadangan devisa yang dimiliki. Untuk itu, Bank Indonesia harus mengelola cadangan devisa secara hati-hati. Oleh karena itu, penerapan manajemen resiko yang akurat amat diperlukan. Informasi dan kemampuan sistem yang memadai untuk analisis dalam rangka manajemen resiko dapat disaranai oleh sistem akuntansi yang baik.

- Mengawasi Bank.

Bank Indonesia merupakan lembaga yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi bank. Pengawasan tersebut dapat dilakukan secara *on-site* maupun *on-desk*. Salah satu instrumen yang digunakan untuk *on-desk monitoring* adalah ketentuan mengenai giro wajib minimum (GWM). Salah satu komponen yang digunakan untuk menghitung GWM adalah saldo giro bank di BI

secara nasional dan dihitung secara harian. Untuk mengetahui Saldo giro bank secara nasional setiap harinya secara akurat, diperlukan sistem akuntansi yang terintegrasi secara nasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia selaku Bank Sentral sangat memerlukan dukungan suatu sistem akuntansi yang memadai, yaitu yang dapat menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat, relevan, dan lengkap sehingga berguna untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengendalian jumlah uang beredar, kelancaran sistem pembayaran, dan pemeliharaan sistem perbankan yang sehat.

Arah Kebijakan Sistem Akuntansi Bank Indonesia

Kebijakan sistem akuntansi Bank Indonesia ke depan adalah bahwa setiap pengembangan aplikasi yang terkait dengan akunting atau transaksi keuangan harus mengacu kepada Desain Utama Sistem keuangan Bank Indonesia. Di samping itu, Bank Indonesia akan selalu meng-*update* sistem akuntansinya sesuai dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi baik di dunia internasional maupun di Indonesia. Antara lain, dengan adanya isu bahwa Pemerintah Indonesia akan menerapkan kebijakan *Treasury Single Account* (TSA), maka Bank Indonesia akan bersikap antisipatif untuk melihat pengaruhnya terhadap sistem akuntansi di Bank Indonesia sehingga kalau diperlukan penyesuaian, maka Bank Indonesia telah mempersiapkan diri. Dengan demikian, sebagai mitra kerja dan kasir Pemerintah, Bank Indonesia siap mendukung rencana Pemerintah.

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa Bank Indonesia sesuai dengan kedudukannya sebagai Bank Sentral memiliki karakteristik dan tugas yang jauh berbeda dibandingkan dengan bank komersial, yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Tugas Bank Indonesia yang non profit oriented dan boleh dikatakan unik tersebut membawa "konsekuensi" terhadap sistem akuntansi yang diterapkan.

Sistem akuntansi Bank Indonesia pada dasarnya telah mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku umum. Dalam menetapkan kebijakan akuntansi, Bank Indonesia juga telah mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan International Accounting Standard (IAS). Namun demikian, sebagai akibat dari keunikan tugas sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia juga melakukan transaksi-transaksi yang tidak lazim dilakukan oleh entitas-entitas lain, tetapi hanya dilakukan oleh bank-Bank Sentral. Dalam mencatat transaksi seperti ini, kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Bank Indonesia adalah mengikuti praktek akuntansi yang diterapkan oleh Bank Sentral pada umumnya, seperti penyajian Kas di sisi kewajiban sebagai offsetting account, dan pengakuan keuntungan/kerugian hasil revaluasi aktiva, dan kewajiban dalam valas pada saat realisasi.

Dalam upaya untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Bank Indonesia, maka kualitas informasi keuangan yang disajikan kepada stakeholder akan selalu dijaga baik dari segi

Penutup

keandalan, keakuratan, maupun dari segi ketepatan waktunya. Oleh karena itu, sistem akuntansi Bank Indonesia akan selalu dikaji dan disempurnakan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan best practices, khususnya praktek-praktek yang dilakukan Bank Sentral pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- a. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (2001), "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Balai Pustaka, Jakarta.
- b. European Central bank (ECB), "Decision of The European Central Bank of 1 December 1999 On The Annual Accounts of The European Central Bank As Amended On 15 December 1999 and 12 December 2000".
- c. Ikatan Akuntan Indonesia (1999), "Standar Akuntansi Keuangan".
- d. International Monetary Fund (1997), "Accounting For Foreign Exchange In Central Bank Operation".
- e. International Monetary Fund (1996), "Central Bank Accounting Workshop Collection".
- f. J. B. Heckert (1983), "Controllership : Tugas Akuntan Manajemen", Penerbit Erlangga Jakarta.
- g. Nugroho Widjajanto (2001), "Sistem Informasi Akuntansi", Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- h. Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia (PDG) No. 1/12/PDG/1999 tentang Sistem Akunting Bank Indonesia.
- i. S. Munawir (2002), "Akuntansi Keuangan dan Manajemen", BPFE Yogyakarta.
- j. Surat Edaran Nomor 5/47/INTERN tanggal 31 Oktober 2003 tentang Perubahan ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/58/INTERN tanggal 31 Desember 2002 tentang Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (PAKBI).

Bank of Japan Accounts (December 31, 1002)

January 7, 2003

Bank of Japan

(thousand yen)

Assets		Liabilities and Capital Accounts	
Cash 1	4,125,409	Bank Deposits	75,471,847,083
Reserve assets under management	196,535,089	Current deposits	19,562,554,805
Government securities	7,509,319,719	Other deposits	1,375,611,641
Bills purchased	2,200,000	Deposits of the government	6,331,013
		Payables under repurchase agreements	
Government securities	83,123,661,710		14,525,101,777
Pecuniary trust (stocks held as trust property) 2.2 Loans (excluding those to the Deposit Insurance Corporation)	150,065,421	Bills sold	1,701,400,000
	193,158,342	Others	1,021,950,950
Foreign currency assets	1,305,667	Reserves	2,732,100,576
Deposits with agencies	313,654,102	Capital	100,000
Other assets	895,244,776	Legal and special reserves	2,404,740,437
Total	125,126,398,290	Total	125,126,398,290
?: Breakdown of government securities			
Long-term government bonds	56,054,907,050		
Treasury bills and financing bills	27,068,754,719		
http://www.boj.or.jp/eng/about/03ac021231.htm		6102003	

SISTEM AKUNTANSI BANK INDONESIA

Consolidated Balance Sheet of the Eurosystem as at 31 December 2001 (*EUR millions*)

Asset	31 December 2001	1 January 2001*	31 December 2000
2 Gold and gold receivables	126,801	118,610	117,073
2 Claims on non-euro area residents denominated in foreign currency			
2.1 Receivables from the IMF	32,008	27,106	26,738
2.2 Balances with banks and security investments, external loans and other external assets	232,957	243,545	232,087
	264,965	270,651	258,825
3 Claims on euro area residents denominated in foreign currency	24,805	19,100	15,786
4 Claims on non-euro area residents denominated in euro			
4.1 Balances with banks, security investments and loans	5,707	4,149	3,750
4.2 Claims arising from the credit facility under ERM II	0	0	0
	5,707	4,149	3,750
5 Lending to euro area credit institutions related to monetary policy operations denominated in euro			
5.1 Main refinancing operations	142,000	222,988	222,988
5.2 Longer-term refinancing operations	60,000	45,000	45,000
5.3 Fine-tuning reverse operations	0	0	0
SA Structural reverse operations	0	0	0
5.5 Marginal lending facility	1,573	608	608
5.6 Credits related to margin calls	24	53	53
	203,598	268,648	268,648
6 Other claims on euro area credit institutions denominated in euro	487	2,286	578
7 Securities of euro area residents denominated in euro	27,984	29,059	26,071
8 General government debt denominated in euro	68,603	69,375	57,671
9 Other assets	90,813	91,208	87,676
Total assets	813,762	873,086	836,078

Totals/sub-totals may not add up due to rounding.

The consolidated balance sheet for 1 January 2001 shows, for the purpose of comparison, the effects of the entry of the Bank of Greece into the Eurosystem on that date. The changes arise mainly from the incorporation of the assets and liabilities of the Bank of Greece and the reclassification of claims and liabilities of the Eurosystem vis-a-vis Greek residents as claims and liabilities against euro area residents.

ECB . Annual Report . 2001

Liabilities	31 December 2001	1 January 2001*	31 December 2000
Banknotes in circulation	269,556	380,281	371,370
2 Liabilities to euro area credit institutions related to monetary policy operations denominated in euro			
2.1 Current accountS (covering the minimum reserve system)	147,580	126,599	124,402
2.2 Deposit facility	488	240	240
2.3 Fixed-term depositS	0	0	0
2.4 Fine-tuning reverse operations	0	0	0
2.5 DepositS related to margin calls	4	0	0
	148,072	126,839	124,642
3 Other liabilities to euro area credit institutions denominated in euro	37,159	10,950	305
4 Debt certificates issued	2,939	3,784	3,784
5 Liabilities to other euro area residents denominated in euro			
5.1 General government	44,970	53,894	53,353
5.2 Other liabilities	6,307	6,020	3,694
	51,277	59,914	57,047
6 Liabilities to non-euroarea residents denominated in euro	9,446	11,412	10,824
7 Liabilities to euro area residents denominated in foreign currency	2,525	6,143	806
8 Liabilities to non-euro area residents denominated in foreign currency			
8.1 DepositS, balances and other liabilities	20,227	14,193	12,414
8.2 Liabilities arising from the credit facility under ERM II	0	0	0
	20,227	14,193	12,414
9 Counterpart of special drawing rights allocated by the IMF	6,967	6,848	6,702
10 Other liabilities	76,107	74,691	72,277
11 Revaluation accounts	125,367	117,972	117,986
12 Capital and reserves	64,118	60,059	57,921
Total liabilities	813,762	873,086	836,078

SISTEM AKUNTANSI BANK INDONESIA

**BANK INDONESIA
NERACA**

Per 31 Desember 2002 Dan 2001
(Dalam Jutaan Rupiah)

I.	AKTIVA	Catatan	2002	2001
1.	Emas	B.1. C.1	9.505.929	8.933.494
2.	Uang Asing	B.2,C.2	13.770	450.286
3.	Hak Tarik Khusus	B.3, C.3	169.207	165.030
4.	Giro	B.4,C.4	4.879.554	11.235.351
4.1	Bank Sentral		3.352.163	8.382.950
4.2	Bank Koresponden		1.527.391	2.852.401
5.	Deposito pada Bank Koresponden	B.5,C.5	53.833.317	69.063.460
6.	Surat Berharga	B.6, C.6	225.056.498	209.867.886
6.1	Dalam Rupiah		0	0
6.2	Dalam Valas		225.056.498	209.867.886
7.	Tagihan			
7.1	Kepada Pemerintah	B.7	351.275.336	315.927.999
7.1.1	Dalam Rupiah	C.7	351.249.254	315.897.657
7.1.2	Dalam Valas	C.8	26.082	30.342
7.2	Kepada Bank	B.8	17.942.326	19.182.702
7.2.1	Dalam Rupiah	C.9	16.882.455	17.949.743
7.2.2	Dalam Valas	C.10	1.059.871	1.232.959
7.3	Kepada Lainnya	B.9,C.11	8.005.981	7.537.529
7.3.1	Dalam Rupiah		8.005.981	7.537.529
7.3.2	Dalam Valas		0	0
8.	Penyisihan Kerugian Aktiva	B.10, C.12	(48.399.906)	(49.753.871)
9.	Penyertaan	B.11, C.13	229.474	229.474
10.	Aktiva Lain-lain	C.14	9.424.169	9.357.393
	JUMLAH AKTIVA		631.935.655	602.196.733

BANK INDONESIA
NERACA

Per 31 Desember 2002 Dan 2001
(Dalam Jutaan Rupiah)

II.	PASIVA	Catatan	2002	2001
A.	KEWAJIBAN			
1.	Uang dalam Peredaran	B.15, C.15	98.395.190	91.275.606
2.	Giro	B.16	229.231.098	224.128.757
2.1	Pemerintah	C.16	103.332.091	85.651.638
2.1.1	Dalam Rupiah		61.813.103	48.684.295
2.1.2	Dalam Valas		41.518.988	36.967.343
2.2	Bank	C.17	44.983.701	41.887.382
2.2.1	Dalam Rupiah		38.326.357	34.668.559
2.2.2	Dalam Valas		6.657.344	7.218.823
2.3	Pihak Swasta Lainnya		924.774	798.236
2.3.1	Dalam Rupiah		795.363	671.321
2.3.2	Dalam Valas		129.411	126.915
2.4	Lembaga Keuangan Int'l		79.990.532	95.791.501
2.4.1	Dalam Rupiah	C.18	79.990.532	95.791.501
2.4.2	Dalam Valas		0	0
3.	Surat Berharga yg diterbitkan	B.17	112.795.991	102.143.747
3.1	Dalam Rupiah	C.19	112.795.991	102.143.747
3.2	Dalam Valas		0	0
4.	Pinjaman dari Pemerintah	B.18, C.20	34.311.039	31.476.677
4.1	Dalam Rupiah		261.792	350.007
4.2	Dalam Valas		2.322.720	2.679.045
4.3	Surat Utang Bank Indonesia		31.726.527	28.447.625
5.	Pinjaman Luar Negeri	B.19, C.21	16.972.012	19.776.825
6.	Kewajiban Lain-lain	C.22	6.282.275	999.211
	JUMLAH KEWAJIBAN		497.987.605	469.800.823
B.	EKUITAS			
1.	Modal	C.23	2.948.029	2.948.029
2.	Cadangan Umum	C.24	20.584.751	8.233.006
3.	Cadangan Tujuan	C.24	8.822.036	3.528.431
4.	Hasil Revaluasi Aktiva Tetap	B.20, C.25	4.865.933	4.871.249
5.	Hasil Revaluasi Kurs dan SSB	B.21, C.26	24.969.454	50.204.504
6.	Hasil Indeksasi SUP	B.22	75.334.511	48.575.749
7.	Hasil Indeksasi SUBI	B.22	(6.428.782)	(3.610.407)
8.	Surplus (Defisit) Th. Sebelumnya		0	0
9.	Surplus (Defisit) Th. Berjalan		2.852.118	17.645.349
	JUMLAH EKUITAS		133.948.050	132.395.910
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		631.935.655	602.196.733

SISTEM AKUNTANSI BANK INDONESIA

**BANK INDONESIA
LAPORAN SURPLUS DEFISIT**

Per 1 Januari - 31 Desember 2002 dan 2001
(Dalam Jutaan Rupiah)

	Catatan	2002	2001
PENERIMAAN			
1.		32.224.784	63.462.682
1.1	C.27	22.861.847	55.040.311
1.2		3.880	3.889
1.3	C.28	9.359.057	8.418.482
2.		58.455	42.163
3.		24.743	46.811
4.		800.235	178.461
4.1		92.625	178.461
4.2	C.12, C.29	707.610	0
JUMLAH PENERIMAAN		33.108.217	63.730.117
PENGELUARAN			
1.		26.867.476	21.075.424
1.1	C.30	18.379.704	15.407.479
1.2	C.31	8.487.772	5.667.945
2.		1.060.137	718.498
2.1	C.32	1.013.810	679.537
2.2		46.327	38.961
3.		69.768	52.505
4.		2.258.718	24.238.341
4.1		153.495	138.339
4.2		2.542	2.542
4.3		0	22.068.133
4.4	C.33	2.102.681	2.029.327
JUMLAH PENGELUARAN		30.256.099	46.084.768
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		2.852.118	17.645.349
Beban karena Pos Luar Biasa		0	0
SURPLUS (DEFISIT)		2.852.118	17.645.349

BANK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Periode 1 Januari - 31 Desember 2002
(Dalam Jutaan Rupiah)

I	EKUITAS	31 Desember 2001	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2002
1.	Modal	2.948.029	0	0	2.948.029
2.	Cadangan Umum	8.233.006	12.351.745	0	20.584.751
3.	Cadangan Tujuan	3.528.431	5.293.605	0	8.822.036
4.	Hasil Revaluasi Aktiva Tetap	4.871.249	0	5.316	4.865.933
5.	Hasil Revaluasi Kurs & SSB	50.204.504	0	25.235.050	24.969.454
6.	Hasil Indeksasi SUP	48.575.749	26.758.762	0	75.334.511
7.	Hasil Indeksasi SUBI	(3.610.407)	0	2.818.375	(6.428.782)
8.	Surplus (Defisit) Th Sebelumnya	0	0	0	0
9.	Surplus (Defisit) Th Berjalan	17.645.349	2.852.118	17.645.349	2.852.118
	Jumlah	132.395.910	47.256.230	45.704.090	133.948.050
II. KEWAJIBAN MONETER					
1.	Uang Dalam Peredaran				98.395.190
2.	Giro Pemerintah				103.332.091
3.	Giro Bank				44.983.701
4.	Giro Pihak Swasta Lainnya				924.774
5.	Surat Berharga Yg Diterbitkan				112.795.991
6.	Pinjaman dari Pemerintah				34.311.039
7.	Giro Valas bukan Penduduk				(367)
	Jumlah				394.742.419
III. RASIO					
	$\frac{\text{Modal} + \text{Cad. Umum} + \text{Hsl Rev. AT}}{\text{Kewajiban Moneter}} =$		7,19%		
IV. SETORAN ATAU PERMINTAAN TAMBAHAN MODAL KE PEMERINTAH = Rp 0,00					

SISTEM AKUNTANSI BANK INDONESIA

**BANK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS**

Periode 1 Januari - 31 Desember 2002
(Dalam Jutaan Rupiah)

1.	ARUS KAS/SETARA KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
1.1	Surplus		2.852.118
1.2	Kenaikan Emas		(572.435)
1.3	Penurunan Uang Asing		436.516
1.4	Kenaikan Hak Tarik Khusus		(4.177)
1.5	Penurunan Giro		6.355.797
1.6	Penurunan Deposito pd Bank Koresponden		15.230.143
1.7	Kenaikan Surat Berharga		(15.188.612)
1.8	Kenaikan Tagihan:		(34.575.413)
1.8.1	Kenaikan Tagihan kpd Pemerintah	(35.347.337)	
1.8.2	Penurunan Tagihan kpd Bank	1.240.376	
1.8.3	Kenaikan Tagihan kpd Lainnya	(468.452)	
1.9	Kenaikan Aktiva lain-lain		(163.598)
1.10	Penyesuaian-Penyesuaian		(1.197.928)
1.10.1	Penyusutan Aktiva Tetap	153.495	
1.10.2	Pengurangan Penyisihan Kerugian Aktiva	(1.353.965)	
1.10.3	Beban Amortisasi Aktiva Tidak Berwujud	2.542	
1.11	Kenaikan Uang Beredar		7.119.584
1.12	Kenaikan Giro :		5.102.341
1.12.1	Kenaikan Giro Pemerintah	17.680.453	
1.12.2	Kenaikan Giro Bank	3.096.319	
1.12.3	Kenaikan Giro Pihak Swasta Lainnya	126.538	
1.12.4	Penurunan Giro Lemb.Keu.Internasional	(15.800.969)	
1.13	Kenaikan Surat Berharga Yang Diterbitkan		10.652.244
1.14	Kenaikan Kewajiban Lain-lain		5.283.064
	Arus Kas/Setara Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		1.329.644
2.	ARUS KAS/SETARA KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
2.1	Penambahan Penyertaan		0
2.2	Penambahan Aktiva Tetap		(59.215)
	Arus Kas/Setara Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(59.215)
3.	ARUS KAS/SETARA KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
3.1	Kenaikan Pinjaman dari Pemerintah		2.834.362
3.2	Penurunan Pinjaman Luar Negeri		(2.804.813)
3.3	Penambahan Cadangan Umum		12.351.745
3.4	Penambahan Cadangan Tujuan		5.293.605
3.5	Penambahan Hasil Indeksasi SUP		26.758.762
3.6	Penambahan Hasil Indeksasi SUBI		(2.818.375)
3.7	Pengurangan Hasil Revaluasi Aktiva Tetap		(5.316)
3.8	Pengurangan Hasil Revaluasi Kurs dan SSB		(25.235.050)
3.9	Pembagian Surplus Defisit Th. Yang Lalu		(17.645.349)
	Arus Kas/Setara Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(1.270.429)
4.	KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH ARUS KAS/SETARA KAS		0

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan oleh Bank Indonesia secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Emas

Emas terdiri dari emas batangan, deposito emas, dan uang logam emas. Emas batangan dan deposito emas dinilai secara periodik berdasarkan harga pasar.

Uang Asing

Uang Asing disajikan di neraca sebesar nilai nominal dan dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs neraca pada tanggal laporan.

Hak Tarik Khusus (*Special Drawing Rights*)

Hak tarik khusus adalah simpanan wajib pada *International Monetary Fund* (IMF) dalam valuta *SDR (Special Drawing Right)*. Hak tarik khusus disajikan di neraca sebesar nilai nominal dan dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs neraca pada tanggal laporan.

Giro

Giro Bank Indonesia dalam valuta asing pada bank sentral negara lain atau pada bank di luar negeri disajikan di neraca sebesar nilai nominal dan dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs neraca pada tanggal laporan.

Deposito pada Bank Koresponden

Deposito dalam valuta asing pada bank koresponden di luar negeri disajikan di neraca sebesar nilai nominal dan dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs neraca pada tanggal laporan.

Surat Berharga

Surat berharga yang dimiliki Bank Indonesia dikelompokkan berdasarkan tujuan pemilikan, yaitu dimiliki hingga jatuh tempo (*held to maturity*) yang disajikan berdasarkan harga perolehan dan tersedia

SISTEM AKUNTANSI BANK INDONESIA

untuk dijual (*available for sale*) yang disajikan berdasarkan harga pasar.

Tagihan Kepada Pemerintah

Tagihan kepada Pemerintah terdiri dari obligasi Pemerintah, surat utang Pemerintah, dan tagihan lainnya kepada Pemerintah.

a. Obligasi Pemerintah

Obligasi Pemerintah yang telah diperjualbelikan dalam rangka Operasi Pasar Terbuka disajikan di neraca sesuai harga pasar (bila ada).

b. Surat Utang Pemerintah

- 1) Surat utang Pemerintah disajikan sebesar nilai surat utang yang belum dilunasi ditambah atau dikurangi dengan indeksasi yang telah dilakukan.
- 2) Hasil indeksasi surat utang disajikan di neraca pada pos Hasil Indeksasi Surat Utang Pemerintah dalam kelompok ekuitas.

c. Tagihan Lainnya kepada Pemerintah

Tagihan lainnya kepada Pemerintah disajikan di neraca sebesar jumlah tagihan yang belum dilunasi oleh Pemerintah.

Tagihan kepada Bank

Tagihan kepada bank disajikan di neraca sebesar jumlah bruto yaitu jumlah yang belum dilunasi oleh bank. Bunga yang masih harus diterima disajikan sebagai bagian dari pos Tagihan kepada Bank.

Tagihan kepada Lainnya

Tagihan kepada lainnya terdiri atas tagihan karena pemberian kredit *channeling*, sisa kredit program, dan lain-lain disajikan di neraca sebesar jumlah bruto yang belum dilunasi nasabah.

Penyisihan Kerugian Aktiva

Bank Indonesia membentuk penyisihan kerugian aktiva secara gabungan berupa penyisihan piutang dan penempatan, taksiran kerugian komitmen, dan kontinjensi.

Evaluasi manajemen atas kolektibilitas/nilai realisasi masing-masing aktiva dilakukan berdasarkan sejumlah faktor antara lain kondisi perekonomian saat ini maupunantisipasi perkembangan ekonomi untuk masa yang akan datang, kondisi keuangan peminjam, hubungan dan kesepakatan Bank Indonesia dengan peminjam sebelumnya, kelancaran pembayaran pada masa lampau, kemampuan membayar, nilai jaminan, dan faktor-faktor relevan lainnya.

Penyertaan

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, penyertaan Bank Indonesia harus didivestasi seluruhnya dalam periode tertentu, sehingga penyertaan yang dicatat dengan harga perolehan (*historical cost*) tersebut tidak dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Bank Indonesia. Apabila terdapat penurunan permanen, maka nilai tercatat penyertaan harus disesuaikan sebesar nilai penurunan permanen tersebut.

Aktiva Tetap

Bank Indonesia telah melakukan penilaian kembali aktiva tetap. Selisih antara nilai pasar atau nilai wajar dengan nilai buku aktiva disajikan di neraca pada pos Hasil Revaluasi Aktiva Tetap. Aktiva yang telah dinilai kembali tersebut disajikan sebesar nilai revaluasi (nilai pasar atau nilai wajar) dikurangi akumulasi penyusutan.

Aktiva tetap disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat aktiva yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus.

Aktiva Sewa Guna Usaha

Aktiva sewa guna usaha dicatat pada sisi aktiva dalam pos Aktiva Sewa Guna Usaha dan pada sisi kewajiban dalam pos Kewajiban Sewa Guna Usaha pada awal masa sewa guna usaha. Jumlah yang dicatat sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha

SISTEM AKUNTANSI BANK INDONESIA

ditambah nilai sisa (harga opsi). Setiap pembayaran sewa guna usaha dialokasikan dan dicatat sebagai angsuran pokok kewajiban sewa guna usaha dan beban bunga.

Aktiva sewa guna usaha disusutkan selama masa manfaat dengan metode garis lurus.

Aktiva Tidak Berwujud

Aktiva tidak berwujud diakui apabila telah dimanfaatkan dalam kegiatan sehari-hari dan disajikan sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Aktiva tidak berwujud diamortisasikan berdasarkan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

Uang dalam Peredaran

Uang dalam peredaran disajikan sebagai komponen kewajiban sebesar nilai nominal jumlah uang kertas dan uang logam yang telah dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah oleh Bank Indonesia dan tidak berada dalam penguasaan Bank Indonesia.

Giro

Giro atau simpanan pihak lain pada Bank Indonesia terdiri atas giro dalam rupiah dan giro dalam valuta asing. Giro dalam rupiah disajikan sebesar nilai nominal, sedangkan giro dalam valuta asing disajikan dan dijabarkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs neraca Bank Indonesia pada tanggal laporan.

Khusus untuk giro IMF yang digunakan untuk mencatat kewajiban kepada IMF, direvaluasi setiap tanggal 30 April dengan menggunakan kurs SDR terhadap Rupiah yang ditetapkan oleh IMF pada tanggal tutup buku IMF. Selisih kurs yang timbul disajikan di neraca pada Revaluasi Kurs dan Surat Surat Berharga yang akan diakui sebagai kerugian pada saat pembayaran pinjaman kepada IMF. Giro IMF disajikan di neraca sebesar saldo valas SDR yang dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs neraca pada tanggal laporan.

Surat Berharga yang Diterbitkan

Termasuk dalam pengertian surat berharga yang diterbitkan

adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yaitu surat utang atas unjuk berjangka waktu maksimal 1 tahun dengan sistem diskonto yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), yaitu sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah, dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

SBI disajikan di neraca sebesar nilai nominal dikurangi diskonto dibayar di muka, sedangkan SWBI disajikan sebesar nilai nominal.

Pinjaman dari Pemerintah

Bagian terbesar dalam pinjaman dari Pemerintah adalah Surat Utang Bank Indonesia (SUBI) yang diindeksasi berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Selisih antara nilai nominal SUBI dengan nilai hasil indeksasi dicatat dalam pos Hasil Indeksasi SUBI dalam kelompok ekuitas. SUBI disajikan di neraca sebesar nilai nominal SUBI yang belum dilunasi, ditambah/ dikurangi dengan hasil indeksasi, dan ditambah bunga SUBI yang masih harus dibayar.

Pinjaman Luar Negeri

Pinjaman luar negeri atau fasilitas pinjaman yang diterima Bank Indonesia dari pihak lain di luar negeri dalam valuta asing disajikan dan dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs neraca pada tanggal laporan.

Hasil Revaluasi Aktiva Tetap

Hasil revaluasi aktiva tetap dicatat sebesar selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku aktiva tetap dan disajikan di neraca dalam kelompok ekuitas.

Transaksi dalam Valuta Asing

Transaksi valuta asing dibukukan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs neraca pada saat terjadinya transaksi. Pada setiap periode waktu tertentu, termasuk akhir tahun, aktiva dan pasiva dalam valuta asing dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs neraca yang berlaku pada tanggal yang bersangkutan. Selisih

SISTEM AKUNTANSI BANK INDONESIA

penjabaran tersebut dicatat dalam rekening Cadangan Selisih Kurs dan disajikan di neraca dalam pada pos Hasil Revaluasi Kurs dan Surat-surat Berharga dalam kelompok ekuitas sampai dengan aktiva yang bersangkutan dijual. Bank Indonesia menggunakan metode *Net Currency Position* (NCP) dalam menghitung hasil revaluasi aktiva dan pasiva valuta asing, harga pokok rata-rata valuta asing, dan laba rugi selisih kurs.

Adapun kurs neraca Bank Indonesia untuk valuta asing utama pada tanggal 31 Desember 2002 adalah Rp8.940,00/USD, Rp7.539,54/JPY100,00, Rp14.334,85/GBP, Rp9.369,58/EUR dan Rp12.109,95/SDR.

Hasil Indeksasi Surat Utang Pemerintah (SUP) dan Surat Utang Bank Indonesia (SUBI)

Indeks yang digunakan dalam menghitung indeksasi SUP dan SUBI adalah IHK yang disepakati bersama oleh Pemerintah dan Bank Indonesia. Dalam hal kesepakatan belum diperoleh, indeks yang digunakan adalah IHK yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS).

Pengakuan Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga dari pinjaman dan penempatan diakui sebagai pendapatan secara akrual.

Taksiran Manajemen

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban, pengungkapan aktiva, dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan. Hasil aktual dapat berbeda dari taksiran-taksiran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Nugroho Widjajanto, Sistem Informasi Akuntansi (Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia).
2. S. Munawir, Akuntansi Keuangan dan Manajemen (BPFE Yogyakarta).
3. International Monetary Fund (IMF), "Central Bank Accounting Workshop Collection".
4. International Monetary Fund (IMF), "Accounting For Foreign Exchange In Central Bank Operation".
5. European Central Bank (ECB), "Decision Of The European Central Bank Of 1 December 1998 On The Annual Accounts Of The European Central Bank As Amended On 15 December 1999".
6. J.B. Heckert, "Controllership".
7. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia".
8. Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia (PDG) No. 1/12/PDG/1999 tentang Sistem Akunting Bank Indonesia.
9. Surat Edaran Nomor 5/47/INTERN tanggal 31 Oktober 2003 tentang Perubahan ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia 4/58/INTERN tanggal 31 Desember 2002 tentang Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (PAKBI).
10. Ikatan Akuntan Indonesia, "Standar Akuntansi Keuangan".

SERI KEBANKSENTRALAN

Seri Kebanksentralan Bank Indonesia

1. Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian, oleh Solikin dan Suseno, Desember 2002.
2. Penyusunan Statistik Uang Beredar, oleh Solikin dan Suseno, Desember 2002.
3. Instrumen-instrumen Pengendalian Moneter, oleh Ascarya, Desember 2002.
4. Neraca Pembayaran: Konsep, Metodologi, dan Penerapan, oleh F.X. Sugiyono, Desember 2002.
5. Kelembagaan Bank Indonesia, oleh F.X. Sugiyono dan Ascarya, Desember 2003.
6. Kebijakan Moneter di Indonesia, oleh Perry Warjiyo dan Solikin, Desember 2003.
7. Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia, oleh Suseno dan Piter Abdullah, Desember 2003.
8. Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia, oleh Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya, Desember 2003.
9. Organisasi Bank Indonesia, oleh Suarpika Bimantoro dan Syahrul Bahroen, Desember 2003.
10. Instrumen Pengendalian Moneter, Operasi Pasar Terbuka, oleh F.X. Sugiyono, Mei 2004.
11. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia, oleh Perry Warjiyo, Mei 2004.

-
12. Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar,
oleh Iskandar Simorangkir dan Suseno, Juli 2004.
 13. Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia,
oleh Hotbin Sigalingging, Ery Setiawan dan Hilde D. Sihaloho,
Juli 2004.
 14. Bank Syariah: Gambaran Umum
oleh Ascarya, Diana Yumanita
Januari 2005
 15. Pasar Uang Rupiah: Gambaran Umum
oleh Mahdi Mahmudy
Maret 2005
 16. Sistem Akuntansi Bank Indonesia
oleh Abdul Rauf dan Haris Effendi
Juni 2005